

NASKAH KEBIJAKAN (POLICY PAPER)

MODEL KEBIJAKAN IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA PENGUATAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN

Dr. Anita Trisiana, SPd,MH.

Dr. Sutoyo,MPd

**Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

Tahun 2017

NASKAH KEBIJAKAN
(*POLICY PAPER*)

**MODEL KEBIJAKAN IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI DALAM
RANGKA PENGUATAN KOMPETENSI
KEWARGANEGARAAN**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

NASKAH KEBIJAKAN
(*POLICY PAPER*)

**MODEL KEBIJAKAN IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI DALAM
RANGKA PENGUATAN KOMPETENSI
KEWARGANEGARAAN**

Penyusun:

Dr. Anita Trisiana, S.Pd , M.H.

Dr. Sutoyo, M.Pd.

**Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2017**

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Anita Trisiana & Sutoyo

Naskah Kebijakan (Policy Paper) Model Kebijakan Implementasi dan Evaluasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi dalam Rangka Penguatan Kompetensi Kewarganegaraan . Cetakan I . CV. Djiwa Amarta Press. Surakarta. 2017

xii + 56 hal; 29 cm

Naskah Kebijakan

(Policy Paper)

Model Kebijakan Implementasi dan

Evaluasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi dalam Rangka

Penguatan Kompetensi Kewarganegaraan

Hak Cipta© . Anita Trisiana & Sutoyo. 2017

Penulis

Dr. Anita Trisiana, S.Pd., M.H.

Dr. Sutoyo, M.Pd.

Editor

Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum

Ilustrasi Sampul

cakraArtdesign

Penerbit

CV. Djiwa Amarta Press

Jl. Awan RT. 03/RW. 21 Gulon, Jebres, Surakarta

Email : djiwaamartapress@gmail.com

Telp. 081938709199

Cetakan I, Edisi I, November 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

ISBN 978-602-5646-00-3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah kebijakan (*policy paper*) sebagai panduan dalam penerapan pendidikan karakter yaitu pada pelaksanaan general education khususnya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Naskah kebijakan ini dikembangkan lagi sebagai acuan dalam menyusun berbagai model, media, bahan ajar yang diarahkan untuk pendidikan karakter. Perpaduan pengembangan model kebijakan dalam bentuk naskah kebijakan ini fokus dalam memberikan penguatan proses pembelajaran, penerapan pendidikan karakter, yaitu dengan mengintegrasikan karakter mahasiswa dengan capaian pembelajaran dalam kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu bagaimana memunculkan sikap intelektual sebagai perekat dalam perwujudan sikap spiritual dan sosial yang akan nampak dalam kompetensi pendidikan kewarganegaraan, dan inilah yang merupakan kebaruan serta nilai unggul dalam model kebijakan yang tim penulis kembangkan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunan naskah kebijakan inovatif ini serta menjadi bagian dari peningkatan mutu pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi pendidikan karakter di Perguruan Tinggi.

Saran, masukan, dan kritik akan lebih memberikan kesempurnaan, untuk itu penulis, merasa masih banyak kekurangan sehingga masukan dan saran diharapkan dari para pembaca.

Surakarta, 2017

Penulis

RINGKASAN

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter adalah adanya partisipasi warganegara dalam mengkritisi persoalan dalam masyarakat yang merupakan bagian dari kompetensi warganegara dalam hal pencapaian keterampilan warga negara dan tentunya tidak terlepas dari *civics virtue, civics disposition, civic responsibility, dan civics skill*. Sikap Intelektual adalah salah satu dari bagian terpenting dari ketercapaian kompetensi warga Negara.

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam naskah kebijakan ini adalah sebagai berikut: menghasilkan sebuah Model kebijakan Pendidikan Karakter yang merupakan pengembangan pendekatan baru pelaksanaan general education di Perguruan Tinggi, khususnya pada pelaksanaan pembelajaran Mata kuliah Umum di Perguruan Tinggi dalam mengembangkan mata kuliah kepribadian melalui berbagai program kegiatan yang merupakan Penciri Perguruan Tinggi. Nilai-nilai dasar yang dapat dikembangkan meliputi nilai karakter, antara lain: Berani dan tegas (*Assertive*); Cermat (*Careful and calculation*); Disiplin (*Discipline*); Jujur (*Honest*); Kerjasama (*Team work*); Mementingkan kepentingan yang lebih besar (*Greater interest*); Percaya diri (*Self confidence*); Semangat pantang menyerah (*High-spirited*); Rela berkorban dan tanpa pamrih (*Sacrifice and selflessly*).

Krisis keteladanan dalam masyarakat, memunculkan serentetan kejadian konflik sosio-kultur yang terjadi ditengah-tengah masyarakat diberbagai daerah. Konflik sosio-kultur yang ada di dalam kehidupan bangsa ini meliputi separatisme, tawuran antar pelajar/mahasiswa, terorisme, dan gerakan-gerakan radikal lainnya yang bersifat laten. Kejadian-kejadian tersebut mencerminkan sikap masyarakat kita yang beringas dan anarkis. Krisis keteladanan yang ada dalam masyarakat perlu dicarikan solusi pemecahannya agar bangsa ini tetap eksis dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa

lainnya. Karakter akan muncul manakala keteladanan sudah dibiasakan di dalam kehidupan masyarakat kita. Karakter perlu dikembangkan dan dicanangkan, dalam kaitannya dengan menipisnya moralitas. Maka untuk mengatasi persoalan bangsa ini salah satunya adalah mengembangkan model pengembangan general education di Perguruan tinggi.

Sejarah telah mencatat, bahwa sejak dulu sosok keteladanan telah diberikan oleh para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh nasional bangsa yang lainnya. Sekarang keteladanan menjadi barang yang langka. Para elit sudah tidak lagi memberikan keteladanan bagi masyarakat. Mereka lebih mementingkan kepentingannya masing-masing dan tidak memikirkan upaya untuk kemajuan bangsanya, seperti keteladanan yang sudah diberikan tokoh bangsa terdahulu. Keteladanan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa memberikan kenyamanan dan keseimbangan pranata sosial bangsa ini. Karakter yang sudah digagas oleh pendiri bangsa ini adalah karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu Nation and Character Building dan merupakan bagian dari penguatan civic responsibility. Hal inilah yang mendasari diperlukannya pengembangan model general education di Perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan pendiri Perguruan tinggi tersebut.

Pembaharuan/reformasi konsep dan paradigma pembelajaran PKn dari yang hanya menekankan pada aspek kognitif menjadi penekanan pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religious serta memiliki karakteristik yang multi dimensional, perlu dilihat dalam tiga aspek antara lain: Pertama, PKn sebagai suatu kajian mengenai “civic virtue” dan “civic culture” yang menjadi landasan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler dan gerakan sosial budaya kewarganegaraan.

Kedua, PKn sebagai program kurikuler memiliki visi dan misi pengembangan kualitas warga negara yang cerdas, demokratis, dan religious baik dalam latar pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah, yang berfungsi

sebagai dasar orientasi dari keseluruhan upaya akademis untuk memahami fenomena dan masalah-masalah sosial secara interdisipliner, sehingga mahasiswa dapat mengambil keputusan yang jernih dan bernalar serta bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara. Ketiga, PKn sebagai gerakan sosial budaya kewarganegaraan yang sinergistik dilakukan dalam upaya membangun “civic virtue” dan “civic culture” melalui partisipatif aktif secara cerdas, demokratis, dan religious dalam lingkungannya. (Winataputra,1999:23).

Pembaharuan itu diharapkan dapat menjadikan peserta didik sebagai young citizen atau warga negara yang cerdas, kreatif, partisipati, prospektif, dan bertanggung jawab agar mampu memberikan masukan terhadap kebijakan publik dilingkungannya. Dalam hal ini, Budimansyah (2008:182) mengungkapkan bahwa perlu dilakukan revitalisasi PKn agar menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri bermakna (*meaningful*) teritegarasi (*integrated*) berbasis nilai (*value based*), menantang (*challenging*) dan mengaktifkan (*activating*).

Secara terperinci masing-masing kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Langkah Analisis Nilai:	Tugas penyelesaian masalah :
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan nilai yang terkait.	1. Mengurangi perbedaan penafsiran tentang nilai yang terkait
2. Mengumpulkan fakta yang berhubungan	2. Mengurangi perbedaan dalam fakta yang berhubungan
3. Menguji kebenaran fakta yang berkaitan	3. Mengurangi perbedaan kebenaran tentang fakta yang bersangkutan
4. Menjelaskan kaitan antara fakta yang bersangkutan	4. Mengurangi perbedaan tentang antara fakta yang bersangkutan
5. Merumuskan keputusan moral sementara	5. Mengurangi perbedaan dalam merumuskan keputusan sementara

Langkah Analisis Nilai:	Tugas penyelesaian masalah :
6. Menguji prinsip moral yang digunakan dalam pengambilan keputusan	6. Mengurangi perbedaan dalam pengujian prinsip moral yang diterima

Selanjutnya dilakukan klarifikasi nilai untuk penyelesaian masalah:

Proses	Subproses
Pertama, memilih	(1) Dengan bebas (2) Dari berbagai alternative (3) Setelah mengadakan pertimbangan tentang berbagai akibatnya
Kedua, menghargai	(4) Merasa bahagia atau gembira dengan pilihannya (5) Mau mengajui pilihannya itu di depan umum
Ketiga, bertindak	(6) Berbuat sesuatu sesuai dengan pilihannya (7) Diulang-ulang sebagai suatu pola tingkah laku dalam hidup

Alasan-Alasan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri mahasiswa. Pengajarannya bertitik tolak dari nilai-nilai sosial tertentu yakni nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.
2. Menurut nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia, manusia memiliki berbagai hak dan kewajiban dalam hidupnya. Setiap hak senantiasa disertai dengan kewajiban, misalnya: hak sebagai pembeli, disertai kewajiban sebagai pembeli terhadap penjual, hak sebagai anak, disertai kewajiban sebagai anak terhadap orang tua: hak sebagai pegawai negeri, disertai kewajiban sebagai pegawai negeri terhadap masyarakat dan Negara; dan sebagainya. Dalam rangka pendidikan karakter, mahasiswa perlu diperkenalkan dengan hak dan kewajibannya, supaya menyadari dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya.

3. Selanjutnya, menurut konsep luhur bangsa Indonesia, hakekat manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, dan makhluk Individu. Sehubungan dengan hakekatnya itu, manusia memiliki hak dan kewajiban asasi, sebagai hak dan kewajiban asasi tersebut juga dihargai secara berimbang. Dalam rangka pendidikan karakter, mahasiswa juga perlu diperkenalkan dengan baik hak dan kewajiban asasinya sebagai manusia.
4. Dalam pembelajaran pendidikan karakter di Indonesia, faktor isi atau nilai merupakan hal yang amat penting. Dalam hal ini berbeda dengan pendidikan moral dalam masyarakat liberal, yang hanya mementingkan proses atau ketrampilan dalam membuat kepentingan moral, Pengajaran nilai menurut pandangan tersebut merupakan suatu indoktrinasi yang ahrus di jauhi. Mahasiswa harus diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan nilainya sendiri. Pandangan ini berbeda dengan falsafah dan budaya luhur bangsa Indonesia, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya berzina, berjudi, adalah perbuatan tercela, yang harus dihindari: orang tua harus dihormati, dan sebagainya. Nilai-nilai ini harus diajarkan kepada anak, sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dalam pembelajaran pendidikan karakter, faktor isi nilai dan proses sama-sama diperhatikan.

Dalam praktiknya, berbagai metode pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan-pendekatan lain dapat digunakan juga dalam pembelajaran pendidikan karakter. Implementasinya sebagai berikut:

- 1). Metode yang digunakan dalam pendekatan Perkembangan Moral Kognitif. Misalnya, mengangkat dan mendiskusikan kasus dan masalah moral dalam masyarakat yang mengandung dilemma. Untuk didiskusikan dalam kelas. Penggunaan metode ini akan dapat menghidupkan suasana kelas. Namun, berbeda dengan pendekatan Perkembangan Moral kognitif yang memberikan kebebasan penuh kepada mahasiswa untuk berfikir dan sampai pada kesimpulan yang sesuai dengan tingkat perkembangan moral reasoning maskter masing-masing, dalam pembelajaran pendidikan karakter maha-

siswa diarahkan sampai pada kesimpulan akhir yang sama, sesuai dengan nilai-nilai sosial tertentu, yang bersumber dari nilai dan budaya luhur bangsa Indonesia.

- 2). Metode pengajaran yang digunakan Pendekatan Analisis Nilai, khususnya prosedur analisis nilai dan penyelesaian masalah yang ditawarkan, bermanfaat juga untuk diaplikasikan sebagai salah satu strategi dalam proses pembelajaran pendidikan karakter. Seperti telah dijelaskan bahwa aspek perkembangan kognitif merupakan aspek yang dipentingkan juga, yakni untuk mendukung dan menjadi dasar dari pengembangan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan penegasan Haydon (1995) bahwa pengetahuan dan pemahaman konsep adalah penting dalam pendidikan moral, untuk membentuk sikap moral yang lebih stabil dalam diri seseorang.
- 3). Metode pengajaran yang digunakan dalam pendekatan Klarifikasi nilai yang memperhatikan faktor keadaan serta bahan pengajaran yang relevan, dapat diaplikasikan juga dalam pembelajaran pendidikan karakter.
- 4). Metode pengajaran yang digunakan dalam pendekatan pembelajaran berbuat bermanfaat juga untuk diaplikasikan dalam pembelajaran pendidikan karakter. Para mahasiswa pada tingkat tertentu lebih tepat untuk melakukan tugas-tugas di luar ruang kelas, yang dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi yang berhubungan dengan lingkungan, seperti yang dituntut oleh pendekatan ini. Meskipun demikian, mengingat kelemahan-kelemahan pendekatan ini. Penggunaan metode dan strategi pengajaran berdasarkan kepada pendekatan ini dapat digunakan dalam batas-batas yang memungkinkan. Untuk itu, perlu dirumuskan program-program yang sederhana dan memungkinkan untuk dilaksanakan pada masing-masing Perguruan Tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA.....	i
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENGANTAR.....	1
BAB II. KARAKTER DAN PERMASALAHANNYA	7
BAB III. PEMBAHARUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.	35
BAB IV. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN <i>MODEL PEMBELAJARAN</i>	41
BAB V. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BAHAN AJAR	49
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I

PENGANTAR

Pembangunan karakter melalui Pendidikan dijadikan salah satu solusi terbaik agar tantangan masa depan dapat terjawab, sehingga kebijakan implementasi pendidikan yang berbasis karakter dijadikan sebagai kekuatan bangsa. Pendidikan formal melalui sekolah dijadikan dasar pijakan sebagaimana keselarasan dalam fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional yaitu “ Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/UUSPN).

Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan adiluhung. Masyarakatnya hidup rukun, ingat semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” yang diambil dari sesanti pada zaman Majapahit “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa” menunjukkan hidup penuh toleransi antar warga negara yang berbeda-beda. Hubungan sosial dihiasi perilaku sopan dan santun, saling menghargai, dan tenggang rasa.

Pembentukan pola tingkah laku seseorang sangat kuat dipengaruhi oleh lingkungan. Kekerasan yang terjadi didalam dunia pendidikan harus dihindari karena akan melahirkan situasi lingkungan yang menghambat proses

pembelajaran. Akan tetapi, hal itu ternyata masih sering terjadi di dunia pendidikan kita. Dampak kekerasan sangat luar biasa baik kita sadari atau tidak. Lingkungan yang keras, dengan tindakan orang lain yang terlalu kasar, adalah bentuk rangsangan dari luar diri yang membuat kita kaget, tidak mampu merespons secara pelan dan memunculkan pemahaman. Misalnya, ketika ada perkataan kasar dan menyakiti pun sekaligus serangan kekerasan pada kita, kita tak sempat berfikir untuk menjelaskannya, tetapi meresponya secara cepat. Itulah yang membuat kita yakin bahwa kekerasan itu dalam banyak hal menghambat pertumbuhan mental secara sehat.

Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan disetiap negara ditujukan untuk mendukung kehidupan demokrasi yang konstitusional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa: “ Kurikulum Pendidikan wajib memuat : Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa”. Tiga mata pelajaran tersebut mensyaratkan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia yang religius, bangsa yang menghargai warganegara-nya, dan identitas kebangsaan dengan bahasa nasionalnya. Sehingga pada ketentuan pasal ini menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang sangat penting dan strategis selain Pendidikan Agama dan Bahasa. Dengan adanya ketentuan tersebut maka Pendidikan Kewarganegaraan harus masuk pada kurikulum di setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, perlu disadari oleh seluruh pemangku kepentingan (*stake-holder*) termasuk seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan perhatian yang cukup signifikan untuk memulai kembali membangun karakter bangsa. Potensi konflik dalam masyarakat yang multikultural cukup besar, karena itu pendidikan yang mampu membangun karakter warga negara yang cinta damai mutlak diperlukan. Sebab tanpa kepemilikan karakter tersebut, sulit bagi bangsa dan negara untuk tetap bertahan menghadapi berbagai

tantangan, berbagai konflik yang lahir dari realitas kebhinnekaan tersebut. Dalam hal ini, pendidikan adalah jembatan paling penting untuk membentuk karakter masyarakat yang multikultural.

Dalam konteks suatu bangsa, karakter dimaknai sebagai nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan kemudian mengejawantah sebagai personalitas dan identitas kolektif bangsa. Menurut PP Muhammadiyah (2009:2) "Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain". Karena itu, dalam pemaknaan demikian, manusia Indonesia yang berkarakter kuat adalah manusia yang memiliki sifat-sifat: religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Sifat religius dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran.

Dengan adanya pendidikan karakter, menurut Muhammad Furqon (2010:3): "Perlu diintegrasikan ke seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan sekolah. Lembaga pendidikan, khususnya sekolah dipandang sebagai tempat yang strategis untuk membentuk karakter". Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dalam segala ucapan, sikap, dan perilakunya mencerminkan karakter yang baik dan kuat. Pemahaman serta internalisasi pendidikan karakter secara komprehensif dapat dilakukan untuk menyaring kebudayaan asing yang dapat merusak moral generasi penerus bangsa. Oleh karena itu lembaga pendidikan harus dapat menjadi penghubung yang baik dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pendidikan karakter.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan *grand design* pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. *Grand design* menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan,

pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dikelompokkan dalam: Olah Hati (*Spiritual and emotional development*), Olah Pikir (*intellectual development*), Olah Raga dan Kinestetik (*Physical and kinesthetic development*), dan Olah Rasa dan Karsa (*Affective and Creativity development*). Pengembangan dan implementasi pendidikan karakter perlu dilakukan dengan mengacu pada *grand design* tersebut.

Pendidikan karakter juga berkembang pesat di belahan dunia, menurut Tillman (2001: 67) salah satunya program yang dilaksanakan adalah “Program Pendidikan Nilai-Nilai Hidup (*Living Values Education Programme/LVEP*)”. Program ini diawali oleh PBB pada saat berulang tahun ke-50 yang diawali dengan adanya proyek internasional yaitu *Sharing Our Values for a Better World* (Berbagi Nilai-Nilai demi sebuah dunia yang lebih baik). Program ini diawali oleh salah satu institut Brahma Kumaris pada tahun 1995.

Maka usaha pendidikan karakter sungguh-sungguh sangat diperlukan dewasa ini. Karena pendidikan karakter dapat menahan kemerosotan karakter dalam kehidupan sekarang, dan mendatang. Menurut filsafat manusia, hakikat manusia ada tiga, yaitu ;

(1). Manusia sebagai makhluk moral, yaitu berbuat sesuai dengan norma-norma susila; (2). Manusia sebagai makhluk individual, yaitu berbuat untuk kepentingan diri sendiri; (3) manusia sebagai makhluk sosial, hidup bermasyarakat, bekerjasama, dan tolong menolong. Ketiga hakikat manusia itu terus berkembang dan mendapat bimbingan dan pengarahan yang benar semenjak kecil sampai dewasa, bahkan sampai usia lanjut.

(Mohamad Mustari, 2011: 12)

Menurut Endang Sumantri, dalam Sarbaini (2011: 3), bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan memperlihatkan potensi yang kuat untuk mengembangkan secara lengkap baik fisik maupun mental manusia dan mendorong pengembangan keterampilan-keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang akan

memungkin mereka untuk meningkatkan kondisi-kondisi kehidupan mereka". Kondisi tersebut dapat memperkuat pemahaman warga Negara terhadap hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan apabila dikaitkan dengan penerapan pendidikan karakter yang menyentuh pada aspek nilai moral masih belum maksimal mencapai tujuan yang diharapkan. Paling tidak ada tiga alasan mengapa seorang dosen harus mampu mengembangkan model. Pertama, belum ada model sebelumnya; kedua, sudah ada model tetapi model tersebut kurang berfungsi secara baik; dan ketiga, sebagai variasi atas model-model yang sudah ada dan boleh jadi sudah berfungsi dengan baik.

BAB II

KARAKTER DAN PERMASALAHANNYA

A. Konsep Karakter

Karakter secara etimologi berasal dari bahasa Yunani `karasso` yang berarti cetak biru, format dasar, sidik seperti sidik jari (Koesoema 2010:90). Menurut Rutland (2009:1), karakter berasal dari akar kata bahasa Latin yang berarti dipahat. Karakter merupakan kumpulan atau gabungan dari kebajikan dan nilai-nilai yang dipahat di dalam batu hidup tersebut, akan menyatakan nilai yang sebenarnya. Senada dengan Rutland, Munir (2010:2) menyatakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani, *charassein*, yang berarti mengukir. Dalam pemakaian berbahasa, karakter disinonimkan dengan tabiat, watak, temperamen, dan kepribadian (Sulhan 2010:1 dan Koesoema 2010:79).

Secara harfiah, Hornby dan Parnwell (1972:49) menyatakan bahwa arti karakter adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi. Senada dengan batasan tersebut, Gulo (1982:29) mengatakan bahwa karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang; biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Berbeda dengan Hornby dan Parnwell dan Gulo, Kertajaya (2010:3) menyatakan bahwa karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda ataupun individu. Ciri khas tersebut asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, Hidayatullah (2010:13) menyatakan

bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak serta yang membedakan dengan individu.

Karakter dapat dibentuk dan dikembangkan melalui usaha pendidikan. Kajian karakter dari segi pendidikan diistilahkan dengan pendidikan karakter. Pembahasan mengenai pendidikan karakter diungkapkan oleh Koesoema (2010). Pendidikan karakter sebagai hasil dari usaha manusia tidaklah tanpa masalah. Pendidikan karakter menjadi semacam tambahan atau asesoris bagi manusia berupa hasil dari pengembangan dirinya. Secara kodrat manusia diciptakan dalam keadaan fitrah atau bersih atau baik, namun dalam perjalanan hidup manusia mempunyai pengalaman yang membuat dia menjadi baik atau tidak baik.

Karakter adalah sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi. Penjelasan mengenai komponen definisi karakter diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Relatif stabil; suatu kondisi yang apabila telah terbentuk akan tidak mudah diubah. Landasan; Kekuatan yang pengaruhnya sangat besar/ dominan dan menyeluruh terhadap hal-hal yang terkait langsung dengan kekuatan yang dimaksud. Penampilan perilaku; aktivitas individu atau kelompok dalam bidang dan wilayah (*setting*) dan bidang kehidupan sebagaimana tersebut diatas. Standar nilai/norma: kondisi yang mengacu kepada kaidah kaidah agama, ilmu, teknologi, hukum, adat, dan kebiasaan, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari seperti: keimanan, dan ketaqwaan, pengendalian diri, disiplin, kerja keras, dan ulet, bertanggungjawab, jujur, membela kebenaran, kepatutan, kesopanan, dan kesantunan, ketaatan pada peraturan, loyal, demokratis, sikap kebersamaan, musyawarah, dan gotong royong, toleran, tertib, damai, dan anti kekerasan, hemat, konsisten.

Karakter yang baik merupakan hal yang kita inginkan bagi anak-anak kita. Terdiri dari apa sajakah karakter yang baik itu? Seorang filsuf Yunani

bernama Aristoteles mendefinisikan karakter yang baik sebagai kehidupan dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri seseorang dan orang lain. Aristoteles mengingatkan kepada kita tentang apa yang cenderung kita lupakan di masa sekarang ini; kehidupan yang berbudi luhur termasuk kebaikan yang berorientasi pada diri sendiri (seperti kontrol diri dan moderasi) sebagaimana halnya dengan kebaikan yang berorientasi pada hal lainnya (seperti kemurahan hati dan belas kasihan), dan kedua jenis kebaikan ini berhubungan. Kita perlu untuk mengendalikan diri kita sendiri-keinginan kita, hasrat kita untuk melakukan hal yang baik bagi orang lain.

Karakter, menurut pengamatan seorang filsuf kontemporer bernama Michael Novak, merupakan “campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religious, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah,” sebagaimana yang ditunjukkan Novak, tidak ada seorang pun yang memiliki semua kebaikan itu, dan setiap orang memiliki beberapa kelemahan. Orang-orang dengan karakter yang sering dipuji bisa jadi sangat berbeda antara satu dengan lainnya.

Pendidikan karakter memang muncul sebagai evaluasi terhadap pendidikan yang bertumpu pada titik berat pemikiran modernisme yang bersifat positivistik yang membuat jiwa manusia kering akibat industrialisasi yang menggeser nilai-nilai spritual dan kemanusiaan. Positivisme yang memisahkan antara subyek dan objek secara dikotomis dipandang sebagai penyebab hilangnya dunia makna dalam diri manusia ketika modernisme adalah ideologi yang terkesan menegaskan kesibukan manusia untuk mengeksploitasi alam. Cita-cita kebebasan justru dipisahkan dari keberakatan makna subjektivitas manusia karena terbiasa membuat manusia hanya percaya pada hal-hal yang kasar dan sesuatu yang biasa diverifikasi.

Kesalahan modernisme yang menganggap pendidikan antara lain pengaruh positivisme yang menganggap pendidikan sebagai sarana untuk menaklukkan alam tempat manusia harus takluk pada hukum alam yang

dianggap evolusioner. Disini pendidikan kehilangan nilai-nilai yaitu subyektif manusia yang seharusnya dihormati kehilangan maknanya dan tereduksi ke dalam kuantitas-kuantitas capaian material saja. Lebih jauh, dari pihak lain muncul kritik bahwa pendidikan modern kehilangan dimensi transedental dan keruhaniahannya. Pihak inilah yang lebih menekankan pada pendidikan karakter yang menggaungkan kembali semangat agama.

Namun, yang perlu diingat, pendidikan karakter juga bukan hanya pendidikan agama dan pendidikan moral. Pendidikan karakter memiliki banyak varian-varian yang dilahirkan dari pemaknaan terhadap karakter manusia. Kita akan melihat titik tekan yang berbeda dalam lintasan waktu yang tepat, bagaimana pendidikan karakter dimaknai. Oleh karena itu, ada baiknya kita menengok pendidikan karakter dalam dinamika sejarah dan lintasan wilayah (tempat) yang berbeda-beda.

Pendidikan karakter merupakan keseluruhan dinamika relasional antarpribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, agar pribadi itu semakin dapat menghayati kebebasannya sehingga ia dapat semakin bertanggung jawab atas pertumbuhan sendirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka. Pendidikan karakter dipahami pertama-tama sebagai keseluruhan dinamika relasional yang dialami oleh individu di dalam dan bersama dengan lingkungan, penilai utama pendidikan karakter adalah individu itu sendiri.

Karena pendidikan karakter bersifat khas individual, pendidikan karakter perlu memperhatikan potensi diri yang dimiliki individu atau berbasis potensi diri. Menurut Khan (2010:14), pendidikan karakter berbasis potensi diri (individu) merupakan pendidikan yang tidak saja membimbing dan membina setiap anak didik untuk memiliki kompetensi intelektual, keterampilan mekanik, dan pembangunan karakter. Pendidikan karakter berbasis potensi diri, tujuan yang diinginkan adalah perubahan sikap yang semula kontra-produktif menjadi produktif, inovatif, dan kreatif.

Dalam sejarah peradaban manusia, pendidikan karakter mendapatkan gaung yang suaranya masih terdengar hingga kini sejak digemakan oleh Peradaban Yunani Kuno dengan parjara filsufnya. Mungkin karena peradaban itu merupakan tempat cita-cita humanisme muncul, tempat pemikiran-pemikiran yang menjadi cikal bakal nilai-nilai kemanusiaan hingga kini berkembang.

B. Sejarah Pendidikan Karakter

1). Pendidikan Karakter Yunani Kuno

Kesaksian munculnya ide-ide Yunani Kuno yang agung salah satunya dapat dilihat dari karya-karya Homeros. Karya-karyanya tentang visi pendidikan karakter. Karyanya yang cukup terkenal berupa puisi-puisi dalam “Illiad” dan Odisea”.

Homeros menempatkan sejarah sebagai kisah para pahlawan. Para pahlawan yang dimaksud adalah orang-orang besar yang memiliki watak baik. Orang besar yang demikian berarti manusia yang baik (*aner agathos*). keterpesonaannya adalah para watak kaum aristokratis (*bangsawan*). Ciri-cirinya adalah kaum yang memiliki *arete*, yang mengacu pada kekuatan fisik, yang menghasilkan sifat keberanian, yang membuat identitas terhormat dan sukses tanpa cacat. Ia juga berarti kekuatan, keuletan, kemakmuran, kepandaian, kemurahan hati, kesehatan, bijaksana, gembira, dan keunggulan-keunggulan lainnya. Dalam karya epiknya, “Illiad”, Homeros memiliki, sosok pahlawan yang menang dalam pertempuran. Bukan hanya kekuatan fisiknya, melainkan juga karena reputasi yang layak menjadi patokan karakter generasi berikutnya.

Selain Homeros, pujangga Yunani lainnya juga menyuguhkan, keutamaan tentara (*Tirteo dan Callino*), keutamaan kegiatan olahraga (*Pindaro*), nilai-nilai warga negara (*Salomo*), juga, keutamaan menjadi orang yang pandai bicara dan

orasi (misalnya, kaum sofis dan Isokrates). Kemudian, juga muncul keutamaan filsafat seperti kita lihat pada Plato.

Keutamaan nilai yang diajarkan oleh Hesiodos yang dasar moralitasnya keadilan dan kerja keras adalah hal yang menarik. Ia menganggap bahwa barangsiapa yang bekerja ia berbuat adil. Ajaran karakter seperti ini bahkan ditunjukkan pada para hakim, seakan ia adalah nabi keadilan.

Hesiodos yakin bahwa kerja adalah keutamaan, yang menegaskan bahwa konsep arete yang pernah dilontarkan Homeros bukan hanya milik kaum bangsawan atau kaum kaya saja. Ia bisa dimiliki oleh banyak dan rakyat biasa, kelas pekerja. Mereka yang tidak bekerja, menurut Hesiodos, berlaku tidak adil dan sulit melihat adanya keadilan.

Jadi, Hesiodos telah menggeser keutamaan nilai bangsawan (orang kaya) dari Homeros menjadi lebih populis yang didasarkan pada keutamaan rakyat mayoritas. Penghargaan atas nilai kerja inilah yang kelak di zaman modern memunculkan filsafat baru yang ingin memberikan penegasan bahwa filsafat dan nilai-nilai utama manusia itu didasarkan pada kepentingan universal yang berbasis pada kelas pekerja. Filsafat itu adalah Marxisme yang muncul sejak abad ke-19.

Jadi ternyata nilai-nilai moral yang ada di zaman Yunani Kuno. Di Yunani telah muncul banyak filsuf dengan penekanan yang berbeda-beda meskipun berujung pada nilai-nilai humanisme dan demokrasi. Homeros dan Hesiodos adalah dua nama sejarawan dan pujangga yang mampu menangkap nilai-nilai yang muncul.

Ada nama lainnya, seperti Tirteo, yang mengungkap munculnya keutamaan yang ada pada orang-orang yang sangat nasionalis yang suka bertempur demi negaranya. Ia merujuk pada Sparta sebagai bangsa yang memiliki nilai keutamaan semacam itu. Ini adalah semangat baru bagi warga negara. Sparta mengajarkan bagaimana patriotisme adalah nilai yang sangat penting, tempat warga harus mengabdikan diri pada negaranya dan harus

diikuti kebenaran untuk berkorban dan menghilangkan kepentingan-kepentingan individu.

Berbeda lagi dengan negara kota yang bernama Athrna. Jika Sparta berkarakter patriotis dan suka berperang dengan penuh keberanian, Athena identik dengan nilai-nilai demokratis dan dipenuhi banyak pemikiran filsafat dan keindahan. Athena pernah menjadi saksi dari para pemberani yang suka berperang, tetapi kemudian mengalami perubahan yang signifikan menuju negara kota yang diwarnai dengan upaya mencari kebijakan, karakter militer menghilang berubah menjadi masyarakat sipil yang melahirkan nilai-nilai yang kelak menjadi cikal bakal pengetahuan manusia. Kemajuan masyarakat sipil terjadi sejak Athena dipelopori oleh Solon (630-560 SM). Ia adalah seorang pembaru yang sangat keranjingan adakan seni dan kebudayaan. Posisinya sebagai arconte (semacam anggota legislatif di Yunani yang punya kewenangan menjalankan pemerintahan) sangat menentukan sejarah ketika ia memulai sebuah konsensus bersama anatar warga polis. Ia tanggung jawab dan hak para bangsawan saja, melainkan juga seluruh warga negara.

Kehidupan sipil semakin berkembang masa kerajaan terjadi di Athena Pada masa Perikles (sekitar abad ke-5 SM). Pendidikan mulai menjadi kegiatan yang berguna untuk mendidik nilai-nilai sipil. Pendidikan sipil berbasis pada disebarkannya nilai-nilai demokrasi dan hak-hak individu, tempat seni menyampaikan gagasan sangat terkenal terutama seni berbicara melalui retirika dan orasi. Nilai-nilai yang dibawa kaum Sofis ini sangat penting sekali artinya untuk menciptakan karakter politik yang demokratis. Orang-orang mulai tertarik pada pencarian akan kebijaksanaan dan penyampaian gagasan yang dilakukan dengan kata-kata yang indah dan menarik.

Kaum Sofis dicap secara negatif sebagai kaum yang hanya suka bersilat lidah. Mereka dianggap hanya menghabiskan banyak waktu untuk seni bicara, tetapi kurang peduli pada kebenaran. Di sinilah kemudian mulai terpikirkan pentingnya nilai-nilai kebenaran dan esensi dari suatu pikiran. Inilah yang

kemudian memunculkan Socrates (470-399 SM) yang mengajak untuk kembali pada kedalaman jiwa manusia dan bukan pada teknik-teknik bicara indah. Pernyataannya yang cukup terkenal adalah “ Kenalilah dirimu sendiri”, bukan hanya nama, melainkan sebagai esensi jiwa yang membedakan kita dengan makhluk rendah lainnya.

Sumbangannya pada filsafat dan jalan menuju kebijaksanaan berpijak pada kebutuhan manusia untuk mulai mengenal dunia melalui pengetahuan. Metode yang diperkenalkannya adalah metode pengujian realitas secara induktif. Upaya Socrates untuk mencurahkan perhatiannya pada perkembangan metodologi atau model prosedural untuk mencapai kebenaran sampai ditemukannya metode definisi atau dialektika dalam hal pengujian secara kritis terhadap kebenaran sebuah opini.

Melalui proses tanya jawab secara terus-menerus, dia berupaya menembus esensi atau hakikat subyek, seperti keadilan atau kebebasan, untuk sampai pada definisi yang universal. Pertama-tama, ia mencari definisi superfisial istilah tersebut dan para pendengarnya dan kemudian, melalui pengujian silang, mengajak mereka untuk melihat kekurangan-kekurangannya. Pertanyaan-pertanyaan selalu mengarahkan mereka secara berlahan-lahan dan terasa ke wilayah yang dia yakini sebagai tempat kebenaran. Setiap langkah diarahkan pada inspeksi kritis terhadap akal. Socrates menyebut metode ini dengan *maieutic* (dari bahasa Yunani *maieutikos* yang berarti bidan). Meski demikian, seni perbidanan intelektuallah yang mencoba melepaskan pemikiran yang tertidur dari pemikirannya dan mengarahkannya untuk mencapai esensi. Metode Socrates yang baik digambarkan dalam dialog-dialog Plato, muridnya yang juga merupakan filsuf politik yang lebih nyata dibandingkan Socrates.

Bagi Socrates, formulasi doktrin kebaikan adalah pengetahuan. Menurutnya, orang yang bijak adalah orang yang mengetahui sedangkan orang yang berdosa adalah orang yang bodoh. Pengetahuan yang benar akan membimbing pada tindakan yang benar. Tindakan jahat adalah akibat dari wawasan yang

kurang baik. Tak terbayangkan olehnya bahwa seseorang yang mengetahui dasar kebaikan dan kebenaran akan berbuat jahat. Karena tidak ada manusia yang berbuat dosa secara sengaja, pengetahuan diperlukan untuk membuatnya benar-benar bijak. Karenanya, wajib untuk mengajar manusia agar mengerti dan memahami agungnya kebenaran hidup. Dengan mengetahui kebenaran itu, manusia akan berbuat secara bijak dan akan memperbaiki kerusakan masyarakat.

Ajaran yang di dapat kita petik tentang karakter Socrates adalah bahwa nilai-nilai yang lahir dari pengetahuan yang benar amatlah penting bagi pembentukan nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang. Tanpa pengetahuan yang benar tentang nilai moral, akan sulit bagi orang untuk melakukan suatu tindakan yang bermoral. Sebab, tindakan moral adalah tindakan dasar dan bebas yang dilakukan demi kepentingan nilai dalam diri seseorang tersebut.

Setelah Socrates, muncul nama Plato (429-347 SM) yang merupakan murid Socrates. Saat Socrates dihukum mati dengan cara minum racun. Plato berusia 29 tahun. Plato adalah pendidik karakter yang nyata karena mendirikan sekolah filsafat di sebuah hutan kecil yang tak jauh dari Athena, yang namanya diambil dari nama pahlawan legendaris Yunani. Academicus. Inilah asal mula munculnya istilah akademi yang setelahnya ribuan "akademi" bermunculan di berbagai belahan dunia. Di akademi itu Plato mengajar selama 40 tahun, hanya terputus sementara karena kepergiannya ke Sisilia beberapa kali. Dalam usianya yang ke 81 tahun, ia meninggal di Athena.

Pendidikan karakter Plato diabaikan untuk mengejar keutamaan hidup masa ketika pendidikan yang hanya mengejar sukses, rasa hormat, apalagi popularitas dianggap sebagai karakter yang rendah. Plato berusaha mencetak karakter dengan ukuran bahwa seseorang pemimpin itu haruslah orang yang bijaksana. Ia percaya bahwa pemimpin yang bijaksana adalah filsuf.

Prajurit adalah menggunakan kebesaran nafsu dan jiwanya yang berani. Kelas ini mencakup golongan militer dan pejabat administratif, tugasnya

menjaga negara dan menegakkan hukum. Sedangkan, produsen dikaitkan dengan pancainderanya. Mereka adalah bagian besar dari rakyat yang bertugas menyediakan kebutuhan material untuk masyarakat.

Mengapa memilih karakter utama adalah orang yang punya kebijakan akibat pengetahuannya? Sebab, kebijakan adalah pengetahuan. Dalam hal ini, ada tiga konsep yang harus dipahami. Pertama, kebenaran harus obyektif dan tidak berubah agar kita hanya bisa mencapai pengetahuan mengenainya. Sebaliknya, kita hanya bisa memiliki opini dan bukannya pengetahuan yang sejati. Kedua, karena kebijakan disamakan dengan pengetahuan, orang yang mengetahui harus diberi peran menentukan dalam urusan publik. Tugas untuk menemukan penguasa yang baik dan bijak, dengan demikian, dilakukan dengan ujian pengajaran. Ketiga, negara harus mengambil peran aktif dalam mendidik rakyatnya. Khususnya kepada orang-orang yang percaya dengan bimbingan dan arahan kehidupan publik. Suatu masyarakat yang semakin bijak dan berfungsi secara baik dan dibantu dengan pelatihan hingga memperoleh kemampuan yang luas.

Pendidikan karakter Plato berangkat dari kepercayaan bahwa dengan mencetak orang-orang yang bijak, kita bisa menciptakan negara yang ideal. Tujuan negara dalam konsep Plato memang tampak ideal sekali. Karena negara adalah kesejahteraan bersama. Kata Plato " Tujuan kita menegakkan negara bukanlah ketidakseimbangan kebahagiaan kelas tertentu, melainkan demi kebahagiaan buat semua".

Pemikiran politik Plato yang sangat klasik bisa saja dianggap tak sesuai dengan politik modern sekarang ini. Akan tetapi, ada hal-hal yang menarik yang masih harus dipertahankan. Peran pokok yang harus dimainkan oleh pendidikan bagi warga masyarakat merupakan tekanan pemikirannya yang harus dilakukan negara dan kekuatan politik saat ini, terutama di Indonesia. Ketidaksukaannya pada korupsi dan penyelewengan kekuasaan, serta mimpi

indah tentang tanggung jawab negara untuk kesejahteraan umum dan masyarakat masih sangat relevan untuk konteks negara sekarang ini.

Nama Aristoteles (384-322 SM) muncul menggantikan Plato, dosennya di Akademia. Beda Aristoteles dengan dosennya adalah jika Plato sangat asyik dengan bentuk-bentuk yang bersifat kekal seperti "ide-ide", Aristoteles justru sangat tertarik untuk memperhatikan perubahan-perubahan atau apa yang dinamakan sebagai proses alam. Aristoteles justru sangat tertarik untuk memperhatikan perubahan-perubahan atau apa yang dinamakan sebagai proses alam. Aristoteles ingin menyoediki sifat-sifat umum dari segala yang ada di dunia ini. "Prima philosophia", yaitu filsafat yang pertama dan utama, mencari hakikat yang terdalam dari apa yang ada. Jadi, filsafatnya adalah ajaran tentang kenyataan atau antologi, suatu cara berfikir realitis (lawan dari filsafat idealitis).

Salah satu karya terkenal adalah yang ditulis Aristoteles, yaitu Etika Nikomakea. Dalam buku ini, ia mengatakan bahwa hidup harus bertujuan pada eudamania yang bila dipahami akan menghasilkan perbuatan dan moral yang baik dan bijak. Sebenarnya, buku itu adalah kumpulan tulisan yang awalnya adalah catatan-catatan dari kuliah-kuliahnya di Lyceum yang kemudian dibukukan sebagai persembahan untuk Nikomachus, anak laki-lakinya.

Etika Aristoteles dikenal sebagai etika yang bersifat teleologis etika yang terarah pada tujuan. Aristoteles berpandangan bahwa segala sesuatu pasti memiliki maksud dan tujuan. Sebagai contoh: sebilah pisau dibuat dengan tujuan untuk mengiris, memotong, dan lain sebagainya. Manusia hidup juga memiliki tujuan. Manusia menciptakan segala sesuatu dengan tujuan-tujuan sehingga dari kecakapan, tindakan dan capaian pengetahuan juga mempunyai tujuan, misalnya menciptakan obat-obatan demi kesehatan, menciptakan ilmu untuk membantu memudahkan hidup, dan lain-lain. Singkatnya menurut Aristoteles (Larry P. Nucci & Darcia N, 2014: 154) menyatakan bahwa: " watak

manusia pada umumnya dan khususnya kebaikan moral tergantung pada gagasan tujuan dasar manusia". Dari pendapat tersebut, maka pendidikan moral didasarkan pada disposisi yang memerlukan pelatihan praktis yang sejalan dengan otoritas moral itu sendiri.

Dalam memaknai pendidikan pun akhirnya ia menekankan pada tujuan praktis sebuah pendidikan. Tujuan praktis ini merupakan kebijaksanaan harian yang berurusan erat dengan dimensi etis dan politis. Sikap terhadap etika ini disebut "Etika Kebijakan" atau etika yang berpusat pada watak : tindakan-tindakan setiap orang harus membuat orang itu lebih baik dan membangun watak yang lebih baik pula. Orang lain akan melihat kita sebagai orang yang pemberani (demikian asumsi Aristoteles) bila kita umumnya melakukan tindakan-tindakan yang berani apabila kesempatan itu muncul. Etika Nikomachea dianggap sebagai salah satu contoh dari etika kebijakan seperti itu. Kita sepakat dengan Aristoteles bahwa kebijakan intelektual adalah suatu nilai yang harus dijunjung tinggi. Aristoteles menguraikan lima kebijakan intelektual, di antaranya: pengetahuan seni, kehati-hatian, intuisi, dan kebijaksanaan.

Setelah Aristoteles, ternyata kemudian ada pembalikan sejarah yang akan mulai mengakhiri kejayaan Yunani. Setelah meninggalnya Iskandar pada tahun 323 SM, dunia terpecah-pecah. Maka, di negeri Yunani muncul perserikatan-perserikatan kota-kota seperti Aetolia dan Archaia, yang merupakan pemerintahan merdeka yang terbentuk serikat. Keadaan ini berlangsung terus sampai negeri Yunani nantinya menjadi bagian dari kerajaan Romawi.

Era transisi menandai terdesaknya universalisme Yunani yang dijunjung sejak Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sekitar 300 SM, muncul tokoh bernama Epicurus (341-270), seorang yang pernah menjadi murid Socrates. Pandangan Epicurus banyak dipengaruhi oleh etika kenikmatan Artippus, yang percaya bahwa tujuan hidup adalah kenikmatan indrawi setinggi mungkin. "kebaikan tertinggi adalah kenikmatan. Kejahatan tertinggi adalah penderitaan. Tentu saja

bukan hanya kenikmatan fisik saja yang masuk dalam kategori itu. Nilai-nilai seperti persahabatan dan penghargaan terhadap kesenian juga masuk didalamnya.

Pandangan tersebut tampaknya menjadi anti tesis dari kecenderungan Yunani Kuno penuh dengan ajaran bahwa hidup diperlukan kontrol diri, kesederhanaan, dan ketulusan, nafsu harus dikekang dan ketentraman hati akan membantu kita menahan penderitaan. Kecenderungan filsafat Epicurean (aliran Epicurus ini) dapat dikatakan materialistik, yang mengajarkan bahwa karakter manusia yang baik itu ditekankan pada upaya mencari kesenangan material. Ia beranggapan bahwa jiwa tidak lebih diraba, seperti partikel napas dan tekanan darah yang tersebar di seluruh tubuh.

Epicurus menolak bahwa ada kebajikan dan nilai moral instrinsik atau standart objektif bagi kebenaran dan kesalahan. Menurutnya tindakan yang menyebabkan kealpaan tau kejahatan disebabkan tindakan tersebut membuat tidak nyaman atau menyebabkan sakit. Filsafat materialisme yang dipegangnya membuat ia beranggapan bahwa jika kebahagiaan terdiri dari kebebasan dari segala kesusahan dan kekhawatiran, tanggung jawab moral pribadi dan rasa takut akan kesadaran dan agama tidak bisa memperoleh tempat dalam kehidupan.

Jika Sebelumnya Plato berupaya memperbaiki kecenderungan hati orang di dalam negara dengan melalui jalan dialektik. Kemudian Aristoteles hendak mempertahankan keadaan dan hendak memperbaikinya dengan pengetahuan tentang kenyataan yang sebenarnya, epicurus justru dengan sikap peikiranya yang ach tak acuh karena terpaksa, yang memberikan penyesuaian pikiran dan pertolongan kepada keadaan yang bobrok, tanpa harapan, dan tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan-keadaan itu. Oleh karena pemikiran seperti itulah, Epicurus melukiskan negara dan hukum hanya sebagai saat yang ternyata tak mempunyai nilai yang sama sekali untuk kemudian hari. Artinya,

karakter yang dibangunnya berlandaskan pesimisme atas ukuran-ukuran moral dan etika.

2). Pendidikan Karakter Romawi dan Abad Pertengahan.

Datangnya era Romawi harus dilihat dari kontinuitas sejarah sebelumnya. Ketika pengaruh Yunani tak menghilang sama sekali. Dalam sejarah pemikiran politik, Romawi dapat dikatakan membawa gagasan yang merupakan transisi dari era Yunani Kuno menuju pemikiran Eropa barat Era Modern. Periode Romawi dikenal bukan karena teori politiknya, melainkan karena hukumnya, dan dalam hal tertentu juga karena administrasinya. Di bidang inilah Romawi meninggalkan warisannya pada Barat. Pendidikan karakter di era Romawi lebih banyak dibentuk melalui keluarga. Pendidikan karakter menekankan dipegangnya nilai-nilai yang disosialisasikan melalui keluarga. Nilai-nilai yang mengandung unsur tradisi yang diwariskan oleh para leluhur. Unsur-unsur karakter yang menonjol dari bangsa Roma adalah nilai-nilai seperti mengutamakan kebaikan tanah air, devosi (*la pietas*) atau penyembahan dan penghormatan pada para dewa, kesetiaan (*la fides*), perilaku yang berkualitas (*la gravitas*), dan nilai-nilai stabilitas (*la constantia*).

Pada era berikutnya, kita menjumpai bagaimana pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh ajaran kristiani telah memunculnya agama ini, yang menandai abad agama yang kadang juga disebut sebagai abad Kegelapan (*The Dark Age*) sebelum munculnya revolusi Industri dan zaman pencerahan. Era “kegelapan” terjadi ketika pendidikan dan arahnya dihegemoni oleh gereja.

Pendidikan karakter di era ini identik dengan pendidikan moral agama yang memang menawarkan konsep-konsep moral dan nilai yang dipandang sebagai jawaban atas masalah-masalah moral sebelumnya. Salah satu adalah bobrohnya kekuasaan Roma, baik secara moral ataupun politik. Meskipun mendapatkan legitimasi dan dasar yuridis (hukum) yang kuat, kerajaan Romawi pada telah jatuh dalam keadaan yang bobrok dan lemah.

Pemerintahan Daerah (Propinsi) menjadi Demoral dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri serta sangat korup. Di kota-kota Romawi juga kedatangan kaum miskin dan para gembel yang menimbulkan berbagai macam kerusuhan sekaligus perlawanan . pada ranah pemikiran, permulaan abad Masehi diwarnai dengan situasi serba putus harapan. Para kaisar pun kian despotik dan korup. Dalam situasi itulah. Ajaran kristiani mendapatkan pengaruh yang luar biasa. Kelahiran Yesus dan pertumbuhannya yang bersahaja menghipnotis orang-orang Romawi. Pengikut Yesus dari Nasareth semakin banyak pengikutnya, membawa agama baru bagi kerajaan, juga menyebarkan kesadaran baru, pemahaman baru, dan harapan baru akan pengampunan. Dengan cepat ajaran Kristen memasuki masyarakat. Yang belakangan juga mendapatkan penerimaan di lingkungan politik negara, hingga gereja mengendalikan negara.

Pendidikan untuk anak-anak diarahkan pada karakter religius sesuai dengan ajaran kristiani. Cita-cita pendidikan kristiani ini adalah mengarahkan pribadi agar mampu memberikan tanggapan bebasnya atas tawaran cinta kasih Allah yang telah menebus dosa-dosa mereka sehingga mereka, dengan pertolongan dan Rahmat Alla, sampai pada kekudusan, menjadi seorang santo dan santa.

Pada kenyataannya, pendidikan karakter kristiani diolah berdasarkan keinginan kekuasaan para aristokrat yang berlindung pada gereja dan hal ini memunculkan berbagai reaksi. Di kalangan penganut Kristen mulai muncul berbagai gerakan yang mempertanyakan posisi kekuasaan Abad Pertengahan. Ada pandangan bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan lebih penting dari pada hubungan manusia dan gereja. Artinya, mulai muncul gejala ketika otoritas gereja mulai dipertanyakan.

Protes yang cukup signifikan dalam sejarah gereja terjadi pada 31 oktober 1517, saat seorang pendeta Augutinian yang bernama Martin Luther menempelkan 95 pernyataan bersejarah di pintu gerjea kastil di Wittenberg.

Martin Luther tidak puas dengan hierarki gereja dan hukum gereja, yang dianggapnya tidak berdasarkan kitab suci dan hanya digunakan untuk memperoleh kekayaan duniawi. Dominasi gereja dan ketidakpuasannya itu seiring dengan kebangkitan cintanya pada kebangsaan Jerman. Akhirnya, ia memperlakukan hubungan antara gereja dan negara. Ketika kaisar Jerman berselisih dengan raja-raja, mula-mula Luther mengajarkan bahwa kaum Kristen boleh membela diri terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang jika kaisar melanggar undang-undang, baginya rakyat tak usah mematuhi.

Pada saat yang sama moralitas gereja semakin tersingkir oleh ide-ide baru yang dibawa oleh Era Pencerahan (*Renaissance*) begitulah banyak orang menyebutkannya. Era ini terjadi mulai abad ke-14 hingga ke -16. Tentunya, tak ada perkembangan pemikiran yang tak disebabkan oleh dinamika material ekonomi. Ketika legitimasi dan dominasi gereja mulai berkurang, campur tangan gereja terhadap politik dan urusan negara mulai di gugat. Di sinilah paham sekularisme muncul, keinginan untuk memisahkan urusan agama dari masalah negara/politik. Orang lebih menyukai pengetahuan dan kebebasan berekspresi dari pada cara berfikir yang terkekang, jadi, ini adalah era pembangunan katedral-katedral megah yang menjadi simbol kejayaan Tuhan, sekarang diarahkan pada pemujaan kepada manusia.

3). Pendidikan Karakter Era Modern

Inilah yang membuat era baru bernama “modernisasi” memusatkan diri pada manusia (*antroposentrisme*). Pandangan subyektif berusaha disingkirkan karena manusia dengan bantuan pengetahuan dan rasionalitas telah dibimbing untuk melihat alam secara obyektif karena alam adalah obyek yang akan dianalisis dan di manfaatkan untuk mengembangkan kehidupannya.

Ludwig Feuerbach dalam *The Essence of Christianity* berkata “Agama adalah sebuah mimpi, di mana pandangan dan emosi kita muncul dihadapan kita sebagai satu keberadaan yang mandiri, yang hadir di luar diri kita.

Pemikiran religius tidaklah membedakan mana yang subyektif, mana yang obyektif pemikirang itu tidak memiliki keraguan; ia memiliki berkah, bukan dalam kemampuan memahami hal-hal di luar dirinya, tetapi dalam melihat dirinya sesuai pandangan sendiri sebagai suatu keberadaan yang khusus dan istimewa.

Pendikotomian subyek dengan obyek itulah yang kemudian dianggap sebagai penyebab munculnya berbagai macam kekeringan makna dalam pribadi-pribadi modern. Modernisasi kapitalis dengan berbagai masalah yang ditimbulkannya (kemiskinan dan pemiskinan, kerusakan lingkungan alam, budaya dangkal, dan lain-lain) muncul karena manusia dianggap terpisah dari maksna subyektifnya dalam kehidupan. Kesibukan hidup dalam rangka mengejar kemajuan dan pertumbuhan material semata, dianggap telah memunculkan masalah-masalah baru dalam ranah karakter manusia.

Jika berbicara mengenai ketidakbermaknaan hidup dan rusaknya karakter manusia dalam era modern, ada pandangan yang menyatakan bahwa manusia telah kehilangan spritualitas yang hanya dijawab dengan agama. Mereka menawarkan pendidikan karakter yang menekankan pada pendidikan moral agama, yang dapat dianggap sebagai solusi atau masalah-masalah modernitas.

Akan tetapi, ada juga pandangan bahwa hal itu bukan hanya masalah pemaknaan religius semata. Rusaknya moral bukanlah masalah internal subyek manusia, melainkan subyektivitas itu juga harus dipahami sebagai bagian dari kehidupan material secara umum. Dalam hal ini, hilangnya subjektivitas bukan semata disebabkan dari dalam dirinya, melainkan oleh kondisi lingkungan sosial yang membentuk subyek tersenut yang bahkan menjadikan manusia sebagai obyek Eksploitasi sebagai contoh munculnya masalah kemanusiaan dan rusaknya karakter dan kepribadian manusia bukan semata tanggung jawab manusia secara individu, melainkan lebih banyak dibentuk oleh kondisi sosial yang ada. Maka pendidikan karakter ditawarkan untuk mengatasi masalah manusia tidak cukup hanya dengan mengisimya dengan moral agama, tetapi

juga diisi dengan kesadaran akan realitas dan mengaktifkan potensi gerakan manusia untuk mengatasi realitas yang ternyata terselenggaranya dan menurunkan karakter kemanusiaanya.

Pandangan pertama tadi mengandaikan pentingnya pendidikan agama yang oleh sebagian orang dan kelompok harus didoktrinkan secara total untuk mengatur manusia dan membentuk karakternya. Pembentukan karakter melalui pendidikan agama banyak dikritik akan menimbulkan potensi akal kritis manusia karena anak-anak hanya diberikan emosi-emosi tertentu yang kadang tak sesuai dengan tindakan yang diperlukan. Dalam esainya yang berjudul "Agama dalam Pendidikan. Bertrand Russell mengungkapkan beberapa sisi buruk pendidikan agama"

Pertama, anak-anak yang sangat cerdas, yang menemukan melalui pemikiran bahwa argumen-argumen mengenai kekelaan itu tidak pasti, akan dipatahkan semangatnya oleh dosen-dosennya, bahwa mungkin dihukum: dan anak-anak yang lain mempererhatikan kecenderungan untuk berfikir serupa, akan dikecutkan hatinya dari percakapan mengenai topik-topik semacam itu, dan mungkin dicegah dari membaca buku-buku yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan kekuatan penalaran mereka.

Kedua, karena dewasa ini kebanyakan orang yang kecerdasannya jauh berada di atas rata-rata agnostik (cuel pada agama) secara terbuka atau diam-diam, para dosen di sekolah yang mendesakkan agama tentu saja tolol dan munafik, kecuali bila mereka merupakan bagian dari kelas kecil orang-orang yang karena suatu kekusutan mempunyai kemampuan intelektual tanpa pertimbangan inteltual. Apa yang terjadi dalam praktik adalah bahwa orang-orang yang berniat menyetujui profesi skolatik mulai menutup benak mereka bagi pemikiran-pemikiran petualangan sejak usia dini. Mereka menjadi penakut dan konvensional dalam teologi dan kemudian melalui suatu transisi yang alamiah dalam segala hal yang lain. Mereka menjadi penakut dan konvensional dalam teologi dan kemudian melalui suatu transisi yang alamiah

dalam segala hal yang lain. Seperti serigala yang telah kehilangan ekornya. Mereka memberitahukan murid-murid mereka bahwa baik untuk menjadi jinak dan konvensional.

Ketiga, mustahil untuk menanamkan semangat ilmiah pada orang muda selama setiap proposisi dianggap keramat dan tidak terbuka untuk dipertanyakan. Merupakan intisari dari sikap ilmiah bahwa secara ilmiah menuntut bukti atas apa saja yang ingin dipercaya dan bahwa sikap ilmiah mengikuti bukti itu tak peduli arah tujuannya.

Kritik Bertrand Russell tersebut memang lahir untuk melihat apa yang terjadi di Barat, sebuah kehidupan yang sekuler dan tampaknya menganggap aneh hal-hal yang barbau agama dan mistik dengan sains yang memiliki pendekatan yang berbeda-beda adalah sesuatu yang aneh. Sains menginginkan peserta didik yang mengetahui dan menyadari realitas alam dan mampu menguak hubungan sosial, terutama demi kemajuan dan kedamaian kehidupan sesuai ideal-ideal kemanusiaan yang diukur dalam patokan ilmiah. Sedangkan, agama dan mistik berisi pandangan bahwa hidup ini sudah diatur oleh sesuatu di luar kehendak manusia.

Pendidikan karakter dalam konsep agama tidak melihat bahwa karakter yang ada di dalam diri anak adalah produk dialektika dengan pengalaman historisnya dan sejarah hubungannya dengan orang lain. Apalagi, agama yang ditafsirkan secara kaku akan mengatakan bahwa ukuran baik buruk dilihat dari hasilnya yang instan, bukan sebagai produk relasi sosial yang menghasilkan hubungan kekuasaan. Keberagaman semacam itu hanya tahu "halal" dan "haram" berdasarkan teks yang ditafsirkan secara saklek dan diseleksi atau ditasirkan sesuai dengan kepentingan tertentu.

Akhirnya, tindakan tertentu yang bisa jadi dikendalikan oleh kepribadian dan karakter seseorang divonis begitu saja tanpa mendialetika kan dengan hubungan-hubungan konkret yang bisa dianalisis berdasarkan kenyataan

materialnya. Maka, yang ada hanyalah vonis-vonis yang kadang mematkan karakter seseorang dalam masyarakat.

Perlu diingat bahwa penilaian terhadap karakter seseorang kadang merupakan "pembunuhan karakter" yang membuat orang yang dinilai menerima dampak psikologis luar biasa, bayangkan jika orang miskin dinilai berdasarkan kemiskinannya tanpa melihatnya sebagai produk masyarakat (pemiskinan akibat sistem). Maka, pendidik moral dan boleh itu" sembari tidak menyerukan sama sekali terhadap tindakan jahat para penguasa. Sasaran pendidikan moral agama adalah anak-anak orang miskin dengan meniti beratkan pada ajaran-ajaran tekstual yang harus dihafal, yang biasanya dipilih sesuai kepentingan kekuasaan. Sedangkan ayat-ayat yang dapat ditafsirkan untuk memahami situasi pemiskinan hampir sama sekali tidak dimunculkan.

Di era modern yang kapitalistik dengan ciri krisis kesajahteraan rakyat, dominasi pendidikan karakter fatalistik berisi doktrin-doktrin agama yang membuat generasi pasrah memiliki efek psikologis tertentu. Diera globalisasi kapitalis ketika Indonesia berada dalam posisi kalah (paling terisap dalam hubungan global), pembangunan karakter fatalisme dan tradisionalisme dapat dikatakan sebagai reaksi dari perkembangan sosial yang cepat dan tidak mampu dihadapi sehingga perasaan akan pentingnya nilai-nilai tradisi (onal) bangkit kembali. Tradisi dijadikan tameng, dibangkitkan, untuk mencari "makna" agar kekalahan dalam bersaing dengan pendidikan dan iptek dan negara lain mendapatkan hiburan.

Salah satu bentuk pendidikan tradisional yang awalnya berisi penuh ajaran agama adalah pondok pesantren. Lembaga pendidikan ini kini mencoba menempatkan diri sebagai lembaga pendidikan yang melengkapi diri dengan ilmu modern agar murid-murid pondok pesantren tidak ketinggalan dengan modernisasi kapitalis, bahkan juga mengaku ingin bersaing dalam kancah global. Mereka berusaha melakukan pembaharuan dan melakukan modernisasi pendidikan lembaga pesantren ini.

Biasanya, jargon yang menjadi tujuannya adalah untuk mencetak generasi beriman dan bertaqwa, tetapi tetap tak ketinggaan dalam persaingan di era modern (globalisasi). Tujuan manisnya adalah untuk mencetak karakter generasi yang menguasai iptek dan imtaq, menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan iman takwa. Ini adalah ekspresi yang wajar sebagai hukum dialektika antara pendidikan tradisional berhadapan dengan perkembangan modern yang dianggap merusak moral dan kemanusiaan dari sudut pemahaman agama. Akan tetapi, karena basisnya adalah pondok pesantren, sisa-sisa karakter tradisionalnya secara nyata masih kelihatan. Misalnya, pola hubungan antara murid dan dosen (atau tepatnya antara santri dan ustad atau sangkai). Meskipun metode pengajaran dan peralatannya semakin canggih, ada tetap yang tertinggal; feodalisme.

Sebagian besar pesantren mengembangkan pendidikan yang canggih, berisi peralatan lengkap, dikomandani para dosen-dosen yang punya kualitas akademis bagus dan cerdas, dengan fasilitas yang sangat maju. Lembaga pendidikan tradisional ini mencoba mendandanni dirinya dengan kemajuan, menawarkan pada orang tua suatu proses pelatihan dan pendidikan yang membuat kecerdasan anak melejit dan tingkat kecerdasannya akan jauh lebih tinggi dari pada sekolah di sekolah yang biasa. Beberapa sekolah baru yang dibangun juga berusaha meniru model pesantren, berusaha memodernisasikan diri dengan tujuan agar sekolahnya didatangi banyak anak dengan cara menjual citra "pesantren" atau pendidikan yang banyak mengajarkan moral agama.

Rata-rata pesantren modern yang mengadopsi pendidikan modern ini juga menerapkan model *full day school* untuk memaksimalkan peran pencerdasan dan pembentukan mentalnya pada anak-anak. Sebagian besar memang dikelola untuk menjadi lembaga pendidikan komersial agar banyak orangtua yang menyekolahkan anak-anaknya dengan membayar sejumlah biaya pendidikan yang cukup banyak. Penulis terikat apa yang ditulis Vernon

Smith. "orangtua ideal bagi pendidikan tradisional adalah yang menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari sekolah, tetapi mengirim uang ke sana sesering-seringnya.

Sistem pendidikan ini memang berusaha memelihara tradisi model pesantren sejak lama, tempat anak-anak didik (santri) harus secara penuh berada di lembaga pendidikan. Anak-anak didik ini jauh dari orang tua. Baik orang tua yang merasa tak mampu atau malas mendidik anaknya di rumah atau yang tak mampu atau malas mendidik anaknya di rumah atau tak mau repot mengontrol "moral" dan "mental" anak yang sekolah di sekolah "biasa" (umum), atau yang takut dampak sistem pendidikan non agama yang banyak memberi pelajaran moral dan agama bagi anak-anak, mereka memang akan lebih suka mengeluarkan banyak uang dari pada melakukan fungsinya sebagai pengarah dan pengontrol anaknya di rumah dan ataupun pergaulan di luar rumah dan sekolah.

Dari berbagai penelitian dan kabar berita yang kita simak berkalangan ketahuan bahwa di beberapa lembaga pendidikan agama, seperti pondok pesantren yang memang sudah mengadopsi pula sekolah modernm juga muncul pendidikan karakter yang mencoba menegaskan diri untuk membentuk kader-kader yang memahami agama, bahkan secara keras. Anak-anak didoktrin dengan tafsiran agama yang ketat dan sempit agar mereka bisa diarahkan kepada gerakan-gerakan jihad yang menghalalkan kekerasan dan siap berperang negara sering menyebut mereka sebagai teroris. Pembangunan karakter yang dibentuk disini adalah membangun keberanian untuk berperang (perjuangan bersenjata) untuk mewujudkan cita-cita negara agama dan menganggap bahwa tafsir mereka sendiri tentang agama adalah yang paling benar, yang tidak sesuai dengan mereka dianggap "kafir" yang layak dimusuhi.

Bagi kita yang berpikiran terbuka dan demokratis, pembangunan karkter yang berusaha diarahkan pada tingkah laku politik ideologis tertentu semacam

itu amat memperhatikan. Anak-anak menjadi korban doktrin paham sempit keagamaan yang ternyata menguntungkan orang tua yang ingin berpolitik memakai baju agama. Ini memang gejala era sekarang ini, ketika kapitalisme menimbulkan krisis kesejahteraan yang menimbulkan krisis eksistensi diri, pendidikan karakter dibangun sesuai dengan kepentingan kelompok-kelompok orang yang gagap untuk memaknai kehidupan secara benar. Kondisi tersebut diatas perlu menjadi perhatian kita semua. Anak-anak dan kaum remaja belia yang seharusnya mendapatkan hak-haknya untuk bertumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi yang sehat jasmani dan rohani, harus diselamatkan dan kecamuk politik dan konflik ideologi.

Yang penting sebenarnya adalah pencegahan. Kita harus mempersiapkan suatu kondisi masyarakat yang membuat anak-anak sebagai korban. Korban adalah mereka yang terpinggirkan. Tidak mungkin anak-anak akan mewarisi ideologi kekerasan jika mereka tidak menjadi bagian dari mereka yang terpinggirkan, teraniaya, bahkan terdesak. Kalau kita lihat anak-anak yang direkrut dalam gerakan yang menggunakan teror dan kekerasan adalah mereka yang secara ekonomi miskin. Selain itu, juga mereka yang mendalam karena orang tua dan saudara dekat mereka juga menjadi korban. Lihatlah anak-anak yang dibesarkan di daerah konflik, seperti di Jalur Gaza, anak-anak tidak lagi memikirkan bagaimana supaya mereka bisa sekolah dan belajar atau bermain. Sejak kecil mereka diajari merakit bom, memegang senjata, dan dilatih untuk menyerang musuh. Karena mereka tidak memiliki apa-apa lagi orang tua dan saudara-saudaranya telah mati terkena bom yang diluncurkan Israel.

Masih ingat beberapa tahun lalu, serangan Israel ke Jalur Gaza dan wilayah-wilayah lain di Palestina benar-benar menimbulkan dampak kemanusiaan yang luar biasa. Ketika serangan itu juga memangsa anak-anak yang tidak berdosa, yang seharusnya mendapatkan suasana yang damai dan sejahtera bagi perkembangannya adalah hal yang dibayangkan. Sekitar 50 persen penduduk Jalur Gaza adalah anak-anak dari korban tewas. 220 di

antaranya adalah anak-anak berusia di bawah 17 tahun. Anak-anak yang selamat pun akan menghadapi masalah. Mereka terkejut, menangis, untuk sebuah alasan yang tidak mereka tahu karena ada yang berusia di bawah lima tahun. Masalah yang dihadapi anak-anak akan meningkat karena keluarga mereka terpaksa melarikan diri menghindari serangan dan sebagian rumah mereka telah rata dengan tanah. Padahal, sebelum serangan Israel, sekitar tahun 50.000 anak Palestina sudah kekurangan gizi akibat blokade Israel selama 18 bulan terakhir di Jalur Gaza (Kompas, 08/01/2009).

Berbagai macam kantong-kantong kekerasan dan perang global di beberapa belahan dunia juga menyerat anak-anak kita terlibat dalam doktrinasi kekerasan. Cara pandang menghalalkan kekerasan telah disuntikan pada benak dan perasaan anak-anak itu. Perang dan imperialisme telah menjauhkan anak-anak dari perhatian orang tua atau orang dekat yang dapat mengasihinya.

Gambaran kekejaman orangtua yang mengajari anak-anak untuk membenci dan memusuhi kelompok lain semacam itu adalah racun bagi anak-anak. Bagaimanapun, anak-anak adalah milik dunia dan mereka harus tumbuh menjadi sosok yang punya kesadaran universal tentang manusia dan hubungan-hubungannya. Anak-anak harus kita cegah untuk membenci, tetapi harus di ajari untuk mencintai dan terlibat dalam peran yang produktif bagi pembangunan peradaban.

Pertama-pertama yang harus kita cegah adalah perang dan konflik, serta penyebab dari konflik itu harus kita pahami dan kita atasi bersama. Kita menyerang penjajahan dan perampasan hak, tetapi kita juga harus mencegah reaksi yang bermakna dendam bagi anak-anak. Setiap tindakan yang merampas hak-hak anak dan melukai anak harus kita kutuk. Hal yang lebih penting kita harus membukakan mata dari cara pandang stau pihak yang penuh doktrin untuk mendukung kepentingan yang sempit.

Kondisi semacam itulah yang harus kita hindari. Jalan utama mengembalikan anak pada dunia sejatinya adalah memberikan mereka

kesejahteraan, jangan biarkan mereka terjun ke medan tempur dengan dibelaki senjata dan indoktrinasi ideologi sempit. Juga, jangan biarkan anak-anak terjun ke jalan-jalan menjadi pengemis, gelandangan, pencuri, dan penjahat. Anak-anak yang jahat lahir dari situasi ekonomi yang jahat pula.

Anak-anak harus kita selamatkan, ketika manusia lahir, mereka bersih, suci dan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi manusia yang nantinya akan berguna bagi peradaban, manusia yang berguna tentunya adalah yang Produktif, Kreatif, dan Kritis dalam menghadapi realitas bukanya manusia yang hanya meniru pasif konsumtif, dan memiliki kesadaran yang rendah terhadap lingkungannya.

Oleh karena itulah, pendidikan karakter anak dalam makna makro adalah menciptakan ruang-ruang waktu yang kondusif bagi perkembangan anak. Kita harus mencegah kekerasan terhadap anak dalam makna material-ekonomis dan sekaligus ideologi yang berupa internalisasi pemahaman dan makna yang telah tentang kehidupan. Benar bahwa bukan hanya sekolah saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak (didik), melainkan juga keluarga, dan bahkan sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi kita negara ketidakmampuan negara dan sistem ekonomi dalam memberikan hak-hak material (gizi, nutrisi, perumahan, dan fasilitas kehidupan) dan ideologis (melalui pendidikan) harus kita pandang sebagai kekerasan terhadap anak dan sekaligus mengingkari hak asasi manusia (HAM).

4). Pendidikan Karakter di Indonesia

Di Indonesia, akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat hangat sejak Pendidikan Karakter dicanangkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional. Pada 2 Mei 2010. Tekad pemerintah untuk menjadikan pengembangan karakter dan budaya bangsa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional harus didukung secara serius. Akan tetapi, kita juga masih belum tahu

bagaimana keseriusan pemerintah untuk melakukan kebijakan pendidikan nasional untuk mendukung program itu.

Tentunya, karakter bangsa hanya semata dapat dibentuk dari program pendidikan atau proses pembelajaran di dalam kelas. Akan tetapi, kalau memang pendidikan bermaksud serius untuk membentuk karakter generasi bangsa, ada banyak hal yang harus dilakukan, butuh penyadaran terhadap para pendidik dan pelaksana kebijakan pendidikan.

Jika pendidikan dipahami dalam arti luas, sebagai proses penyadaran, pencerdasan, dan pembangunana mental dan karakter, tentu i abuka hanya identik dengan sekolah, akan tetapi, ia berkaitan dengan proses kebudayaan secara umum yang sedang berjalan, yang punya kemampuan untuk mengarahkan kesadaran, memasok informasi, membantuk cara pandang, dan membangun karakter genaerasi muda khususnya. Artinya, karakter yang menyangkut cara pandang dan kebiasaan mahasiswa, remaja, dan kamu muda secara umum hanya sedikit sekali dibentuk dalam ruang kelas atau sekolah, tetapi lebih banyak dibentuk oleh proses sosial yang juga tak dapat dilepaskan dari proses bentukan ideologi dari tatanan material ekonomi yang sedang berjalan.

Jadi, tak terbantahkan jika karakter bangsa, terutama kaum mudanya, dibentuk melauai proses seajrah yang mematerialkan kesadaran, watak, cara pandang, dan mental melalui media-media yang ada, lembaga-lembaga sosial budaya, dan bahkan punya watak yang sangat politis karena memaksakan kepentingan sebuah kekuatan yang membentuk karakter.

Upaya melacak pendidikan karakter dalam sejarah di Indonesia tampaknya akan memperoleh kesulitan dihadapkan dengan fakta bahwa negara kita terdiri dari berbagai macam kelompok sosial yang berusaha memaksakan konsep pembangunan karakternya melalui kekuasaan negara. Belum lagi juga yang dibungkus nuansa suku, ras, dan agama yang banyak sekali jumlahnya. Problem negara besar yang dan agama yang banyak sekali

jumlahnya. Problem negara besar yang terdiri dari banyak kelompok sosial adalah sulitnya mencari karakter apa yang mendefinisikan bangsa dan negaranya. Tidak pernah ada pengentalan watak dalam tubuh bangsa ini karena belum pernah ada penghancuran terhadap fase masyarakat lama yang feodal singktanya belum pernah ada revolusi. Sebagai negara terjajah, karakter yang terbentuk juga mengalami pengerdilan. Namun setidaknya, sejarah telah menunjukkan adanya upaya pembanguanan karakter (*character buliding*) yang kuat untuk menuntaskan proses pembangunan nasional (*character nation building*).

Perubahan yang terjadi dalam pandangan mengenai pendidikan karakter dapat ditelaah dengan teori Transformasi, dari tulisan Amitai Etzioni dalam buku himpunan bunga rampai yang berjudul "Social Change". Teori transformasi dalam tulisannya yang diberi judul "Toward a Theory of Societal Guidance (Etzioni, 1978:154-155). Etzioni mengkaitkan teori ini dengan tipologi masyarakat. Secara garis besar, dia membaga tipologi masyarakat menjadi dua, yakni masyarakat pasif dan lainya masyarakat aktif. Dia menjelaskan karaktersitik dua tipe masyarakat tersebut. Dia menggunakan dua dimensi yang menjadi karakter utama masyarakat. Dua dimensi itu adalah kontrol dan konsensus. Ada masyarakat yang tingkat kontrol dan konsensusnya tinggi; ada masyarakat yang kontrol dan konsensusnya rendah. Masyarakat yang kontrol dan konsensusnya mencapai tingkat tinggi masuk ke dalam masyarakat aktif; dan jika kontrol dan konsensusnya rendah merupakan masyarakat pasif.

Akar permasalahan disetiap periodesasi perkembangan karakter mengalami pasang surut sesuai dengan tipologi dari arah rezim yang berkuasa. Konflik ideologis yang dibarangi dengan konflik politis menjadi balutan yang sangat rentan terhadap keberagaman yang ada disuatu Negara. Untuk itu setiap warga Negara membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap ketercapaian kompetensinya agar dapat berperan secara efektif untuk membangun bangsa dan negaranya.

BAB III

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu kontribusi pendidikan untuk pembangunan karakteristik guna membentuk seorang warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah/negara untuk mendidik dan mengembangkan karakter warga-negaranya agar sesuai dengan ideologi serta politik bangsanya. Hal ini dilakukan baik melalui pendidikan formal untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa menjadi warga negara yang baik, selain itu pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan dalam masyarakat di luar sistem pendidikan.

Secara garis besar terdapat grand teori yang membangun rumpun keilmuan dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu: Ilmu Hukum, Politik dan Filsafat Moral. Dengan demikian sejak awal Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kajian interdisipliner termasuk didalamnya aspek kependidikan. Secara akademik Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi sebagai *nation character building*.

B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tugas mengembangkan peran dari warga negara secara tegas berkaitan dengan masalah pendidikan kebangsaan yang digarap melalui pengembangan dan pemenuhan hak-hak warga negara secara berkeadilan. Hal ini dilakukan dengan proses pembelajaran yang relevan dengan kerangka keilmuan pendidikan kewarganegaraan yang interdisipliner.

C. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Udin S. Winataputra, (2008:3) secara universal diakui bahwa “Komponen kajian pokok pendidikan kewarganegaraan mencakup aspek pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*)”. Ketiga komponen tersebut harus dicapai dalam proses pembelajaran secara terintegrasi atau menyeluruh.

Sedangkan menurut Winarno (2006: 29-30) Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdapat dalam Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, Hukum dan Peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

3. Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan Warga Negara, meliputi: hidup gotong-royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan ini merupakan suatu pembahasan secara formil dan matrial untuk mencapai sasaran berkaitan dengan warganegara yang baik, meliputi wawasan, sikap, dan prilaku warganegara dalam kesatuan bangsa dan negara.

D. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan menengah adalah keseluruhan program kurikuler sebagai upaya mendidik peserta didik menjadi

warga negara yang baik dan bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan Pembelajaran Berbuat (*action learning approach*) menekankan pada usaha memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Superka, *et. al* (1976:13) menyimpulkan ada dua tujuan pendidikan moral berdasarkan kepada pendekatan ini:

Pertama memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri. Kedua, mendorong mahasiswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama, yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya, melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat, yang harus mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi.

Metode-metode pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan analisis nilai dan klarifikasi nilai digunakan juga dalam pendekatan ini. Metode-metode lain yang digunakan juga proyek-proyek tertentu untuk dilakukan di sekolah atau dalam masyarakat, dan praktek ketrampilan dalam berorganisasi atau berhubungan antara sesama.

Menurut Elias (1989), Hersh, *et.all* (1980), dan Superka, *et. all* (1976:38), menyatakan bahwa: "Pendekatan pembelajaran berbuat diprakarsai oleh Newman, dengan memberikan perhatian mendalam pada usaha melibatkan mahasiswa dalam melakukan perubahan-perubahan sosial". Menurut Elias (1989:42), walaupun pendekatan ini berusaha juga untuk meningkatkan keterampilan "*moral reasoning*" dan dimensi afektif, namun tujuan yang paling penting adalah memberikan pengajaran kepada mahasiswa sebagai warga dalam suatu masyarakat yang demokratis. Penganjur pendekatan ini memandang bahwa kelemahan dari berbagai pendekatan lain adalah menghasilkan warga negara yang pasif. Sehingga melalui program-program

pendidikan moral sepatutnya menghasilkan warga negara yang aktif, yakni warga negara yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam lingkungan hidupnya (*environmental competence*), yaitu :

1. Kompetensi fisik (*physical competence*), yang dapat memberikan nilai tertentu terhadap suatu obyek, misalnya :melukis sesuatu, membangun sebuah rumah, dan sebagainya
2. Kompetensi hubungan antarpribadi (*interpersonal competence*), yang dapat memberikan pengaruh kepada orang-orang melalui hubungan antara sesama, misalnya: saling memperhatikan, persahabatan, hubungan ekonomi, dan lain-lain:
3. Kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang dapat memberi pengaruh kepada urusan-urusan masyarakat umum, misalnya: proses pemilihan umum dengan memberi bantuan kepada seorang calon atau partai peserta untuk memperoleh kemenangan, atau melalui kelompok peminat tertentu, mampu mempengaruhi perubahan kebijaksanaan umum.

(Elias, 1986: 45)

Diantara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang ketiga (*civic competence*) merupakan kompetensi yang paling penting, dimana kompetensi ini ingin dikembangkan melalui program-program pendidikan formal.

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mencapai pada aspek kognitif saja, tetapi harus menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, sehingga kekuatan berbagai pendekatan pembelajaran terutama pada program-program yang disediakan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi dapat dikembangkan oleh dosen baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan pembelajaran harus memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik serta peserta didik

dengan dosen, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai oleh peserta didik.

E. Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan

1). Evaluasi Kognitif

Caranya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bentuk pilihan berganda yang menuntut mahasiswa agar melakukan identifikasi tentang fakta, definisi, dan contoh-contoh yang benar. Evaluasi kognitif meliputi: pengetahuan, pemahaman, penggunaan/ penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.

2). Evaluasi Afektif

Caranya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka-tertutup langsung untuk mengungkapkan jawaban-jawaban yang unik. Evaluasi afektif meliputi: menerima, merespon, menilai, mengorganisasi dan karakterisasi.

3). Evaluasi Psikomotor

Caranya dengan mengajukan pertanyaan yang menuntut identifikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang betul dan yang keliru, kesimpulan atau klasifikasi, dengan daftar pertanyaan menjodohkan yang berkenaan dengan konsep, contoh, aturan, penerapan, langkah dan urutan, dengan pertanyaan bentuk esai yang menghendaki uraian, perumusan kembali dengan kata-kata sendiri, dan contoh-contoh.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN

Pendidikan di Indonesia tengah menghadapi masalah terkait dengan tantangan globalisasi yang semakin mewabah dalam segala aspek kehidupan, tantangan tersebut bukan saja menjadi penyebab runtuhnya nilai-nilai luhur bangsa, melainkan pula akan menghambat regenerasi yang berkarakter dan bermoral dalam mengabdikan kepada bangsa.

Di kalangan peserta didik, pendidikan moral menjadi terabaikan, karena kurangnya tenaga pendidik dan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai moral dalam perilaku sehari-hari, dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan karakter yang telah diterapkan di sekolah. Terkait dengan penerapan pendidikan karakter di sekolah, agaknya masih jauh keberhasilan dan harapan setiap orang tua menghendaki anak mereka tetap melandasi perilaku dan tindakannya sesuai dengan nilai moral yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Sebagai bagian dari paradigma pendidikan, pelaksanaan pendidikan karakter harus menjadi suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen terkait harus dilibatkan, termasuk komponen pendidikan, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan

aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana dan prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah. Di samping itu pendidikan karakter juga dimaknai sebagai suatu perilaku yang harus dilakukan warga sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam proses pendidikan, yang mampu menggali seluruh potensi individu secara cerdas dan efektif demi terbentuknya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Untuk itu, diperlukan pembaharuan/reformasi konsep dan paradigma pembelajaran PKn dari yang hanya menekankan pada aspek kognitif menjadi penekanan pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religious serta memiliki karakteristik yang multi dimensional. Pembaharuan itu diharapkan dapat menjadikan peserta didik sebagai *young citizen* atau warga negara yang cerdas, kreatif, partisipati, prospektif, dan bertanggung jawab agar mampu memberikan masukan terhadap kebijakan publik dilingkungannya. Dari pemaparan tersebut, dapat kita ketahui bahwa selama ini proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan aspek kognitif dibandingkan dengan aspek afektif. Seharusnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Untuk itu diperlukan pembenahan terhadap internalisasi nilai, dan karakter seseorang.

Permasalahan penerapan Pembelajaran PKn dan Pendidikan karakter disekolah memang menimbulkan inkonsistensi dan disorientasi antara sekolah dan dosen. Permasalahan tersebut muncul ketika dosen kehilangan orientasi dan konsistensi dalam memberikan pengajaran secara tulus dan penuh tanggungjawab. Namun seringkali, dosen menuntut kesejahteraan dari beban pekerjaan yang cukup berat sehingga hanya mau mengajar, tapi tidak terpanggil untuk mendidik dalam konteks pengabdian atas Negara. Tidak heran, apabila disorientasi sekolah dan dosen berakibat pada hilangnya otoritas, autentitas, dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam

mendidik karakter dan moral bangsa tanpa merasa ada beban dan ketidaknyamanan.

Dalam proses pembelajaran dosen harus mampu menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif, salah satunya adalah model pembelajaran *Project Citizen*, yaitu sebuah model pembelajaran berbasis potofolio, Melalui model ini para mahasiswa bukan hanya diajak untuk memahami konsep dan prinsip keilmuan, tetapi juga mengembangkan kemampuannya untuk bekerja secara kooperatif melalui kegiatan belajar praktik-empirik. dengan demikian pembelajaran akan semakin menantang, mengaktifkan dan lebih bermakna. Secara pedagogis model pembelajaran *Project Citizen* dirancang untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik, langkah-langkah dan metode yang digunakan di dalam proses politik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan komitmen peserta didik terhadap kewarganegaraan dan pemerintahan dengan cara memfasilitasi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar dapat berpartisipasi secara efektif dan bermakna, memberikan pengalaman praktis yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang demokratis, mengembangkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi warga Negara secara demokratis. Misi model ini adalah mendidik peserta didik agar mampu untuk menganalisis berbagai dimensi kebijakan publik, dan kemudian dengan kapasitasnya sebagai "*young citizen*" atau warga negara muda yang cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif dan bertanggung jawab, agar member masukan terhadap kebijakan di lingkungannya. Seluruh keterampilan tersebut merupakan bagian dari pencapaian tujuan pembelajaran dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum 2013.

Agar model pembelajaran *Project Citizen* dapat menjadi bagian dari pengembangan pendidikan karakter di sekolah, maka peneliti mengembangkan model pembelajaran *Project Citizen* dengan harapan model tersebut dapat dikembangkan sejalan dengan pencapaian tujuan pembelajaran PKn secara menyeluruh dan sekaligus dapat menjadi alternatif bagi para dosen untuk

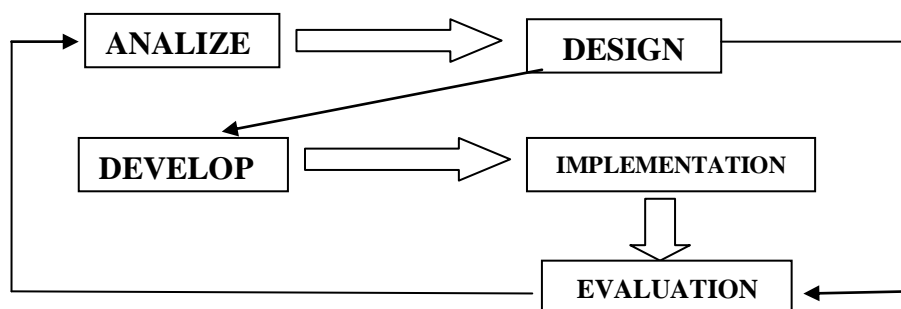
mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa.

Penerapan model Project Citizen, yang dikaitkan dengan pendidikan karakter dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran melalui berbagai program kebijakan pemerintah, sekaligus memberikan kontribusi terhadap evaluasi program, yang disertai dengan meningkatnya partisipasi peserta didik untuk menjadi warga negara yang terampil, kritis, dan bertanggungjawab.

Pengembangan model dapat diartikan sebagai upaya memperluas untuk membawa suatu keadaan atau situasi secara berjenjang kepada situasi yang lebih sempurna atau lebih lengkap maupun keadaan yang lebih baik. Desain pengembangan diselaraskan dengan model ADDIE, model desain pembelajaran ini dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti desain sistem pembelajaran.

Desain Pengembangan Model

Berdasarkan penjelasan di atas, langkah-langkah prosuderal yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan desain pengembangan menurut model ADDIE (*Analysis-Design-Develop-Implement-Evaluate*). Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan yakni seperti gambar dibawah ini :



Gambar 3. Langkah-langkah ADDIE

(Sumber, Steven J. McGriff, *Instructional Systems*, College of Education, Penn State University)

Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. *Analysis* (analisa)

Analysis (analisa) yaitu melakukan *needs assessment* (analisis kebutuhan), mengidentifikasi masalah (kebutuhan), dan melakukan analisis tugas (*task analysis*). Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar, yaitu melakukan *needs assessment* (analisis kebutuhan), mengidentifikasi masalah (kebutuhan), dan melakukan analisis tugas (*task analysis*). Oleh karena itu, output yang akan kita hasilkan adalah berupa karakteristik atau profile calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan.

b. *Design* (desain/perancangan)

Yang kita lakukan dalam tahap desain ini, pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang SMAR (*specific, measurable, applicable, dan realistic*). Selanjutnya menyusun tes, dimana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tadi. Kemudian tentukanlah strategi pembelajaran media yang tepat harusnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, dipertimbangkan pula sumber-sumber pendukung lain, semisal sumber belajar yang relevan, lingkungan belajar yang seperti apa seharusnya, dan lain-lain. Semua itu tertuang dalam suatu dokumen bernama *blue-print* yang jelas dan rinci.

c. *Development* (pengembangan)

Pengembangan adalah proses mewujudkan *blue-print* alias desain tadi menjadi kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperlukan suatu *software* berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum

diimplementasikan. Tahap uji coba ini memang merupakan bagian dari salah satu langkah ADDIE, yaitu evaluasi.

d. *Implementatio n*(implementasi/eksekusi)

Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah keempat dari model desain sistem pembelajaran ADDIE.

e. *Evaluation* (evaluasi/umpan balik)

Evaluasi yaitu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi bisa terjadi pada setiap empat tahap di atas. Evaluasi yang terjadi pada setiap empat tahap di atas itu dinamakan evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari model desain sistem pembelajaran ADDIE. Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran.

Dalam hal ini ditetapkan langkah-langkah :

- (1) Penjelasan tentang informasi sesuai dengan sajian kompetensi dasar
- (2) Mengidentifikasi masalah berbasis pada nilai karakter
- (3) Memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas berbasis pada nilai karakter;
- (4) Mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah itu;
- (5) Mengembangkan portofolio kelas berbasis pada nilai karakter;
- (6) Menyajikan portofolio melalui Media Poster;
- (7) Melakukan refleksi pengalaman belajar berbasis pada nilai karakter.

Pada tahap Evaluasi yang terjadi pada tahap ke empat dengan melakukan evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Evaluasi terhadap program pembelajaran PC bertujuan untuk mengetahui sikap mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Peningkatan kompetensi dalam diri mahasiswa, yang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam program pembelajaran, Keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan kompetensi mahasiswa setelah mengikuti program pembelajaran PC, Efektivitas Model kemudian dianalisis secara kuantitatif.

Berikut ini hasil spesifikasi produk yang akan dihasilkan dengan memenuhi langkah-langkah sebagai berikut:

- Membuat desain perencanaan dengan mengidentifikasi rambu-rambu penyusunan RPP;
- Mengidentifikasi CP, CPL dan Tema sesuai CPMK yang dibuat dalam RPS
- Membuat desain pelaksanaan yang diarahkan pada pengembangan PC.
- Perancangan desain penilaian yaitu Penilaian Autentik pada proses dan hasil belajar dengan kompetensi merancang penilaian autentik pada proses dan hasil belajar mencakup indikator pada penilaian spiritual, penilaian sikap sosial, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan sebagai berikut:
 - mengidentifikasi kaidah perancangan penilaian autentik pada proses dan hasil belajar; dan
 - mengidentifikasi jenis dan bentuk penilaian pada proses dan hasil belajar sesuai karakteristik mata kuliah.

BAB V

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BAHAN AJAR

Bahan ajar dapat memberikan manfaat yang berarti bagi dosen. Bahan ajar dapat memperingan tugas dosen, yaitu dosen tidak perlu terlalu banyak dan lama untuk menyampaikan materi perkuliahan. Dosen hanya menyampaikan hal-hal yang perlu saja karena fungsinya adalah sebagai fasilitator. Manfaat lainnya adalah dosen akan dapat memberikan perkuliahan secara efektif dan efisien karena sebagian besar waktunya dimanfaatkan untuk mengarahkan, membimbing, dan membantu mahasiswa dalam belajar.

Menurut Majid (2006:173), bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen dalam melaksanakan perkuliahan. Bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru (dosen) untuk perencanaan dan penelaahan implementasi perkuliahan. Bahan ajar juga diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikaji mahasiswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai (Depdiknas 2006:1). Pendapat lain tentang definisi bahan ajar diutarakan oleh Astra. Menurutnya, bahan ajar adalah media berisi materi pelajaran yang ditulis berdasarkan kurikulum yang berlaku keluasaan dan kedalaman materi sudah disesuaikan dengan tuntutan kurikulum tersebut (Astra 2007).

Menurut Dick and Carey (1996:229), bahan ajar (*teaching material*) merupakan seperangkat materi atau substansi mata kuliah yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Pendapat yang senada dengan pendapat di atas adalah bahwa bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi perkuliahan yang disusun secara sistematis yang digunakan dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan (Depdiknas 2005:6).

Dengan demikian, ketikan menyusun bahan ajar ada empat landasan yang harus dipenuhi, yaitu landasan keilmuan, landasan ilmu pendidikan dan keguruan, landasan kebutuhan siswa, dan landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan (Muslich 2010:133-169). Berdasarkan landasan keilmuan, penyusun bahan ajar harus memahami dan menguasai teori yang terkait dengan bidang keilmuan atau bidang studi yang ditulisnya. Landasan keilmuan meliputi keakuratan materi, cakupan materi, dan pendukung materi. Landasan ilmu pendidikan dan keguruan terkait dengan hakikat belajar, pembelajaran kontekstual, pembelajaran PAIKEM, dan pengembangan aktivitas, kreativitas, dan motivasi siswa. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku secara keseluruhan, sebagai hasil pengamatan individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Surya 1997).

Dalam pembuatan bahan ajar perlu memperhatikan prinsip penyusunan, prinsip pemilihan, langkah pemilihan, cakupan, dan ruang lingkup bahan ajar (Depdiknas 2005). Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar bahasa Indonesia ada tujuh, yaitu prinsip kebermaknaan, keotentikan, keterpaduan, keberfungsian, performansi komunikatif, kebertautan (kontekstual), dan penilaian. Prinsip kebermaknaan berkaitan dengan kesesuaian antara bahan ajar dan kebutuhan mahasiswa. Prinsip keotentikan bertumpu pada pemilihan dan pengembangan materi pelatihan berbahasa. Prinsip keterpaduan bertumpu pada penataan materi bahan ajar. Prinsip

keberfungsian tampak dalam pemilihan metode dan teknik pembelajaran. Prinsip performansi komunikatif merupakan segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya peristiwa belajar yang dapat berupa kegiatan berbahasa, mengamati, berlatih atau merenung. Prinsip kebertautan berkaitan dengan pemilihan dan pemanfaatan media dan sumber belajar. Prinsip penilaian berkaitan dengan pengukuran hasil belajar mahasiswa.

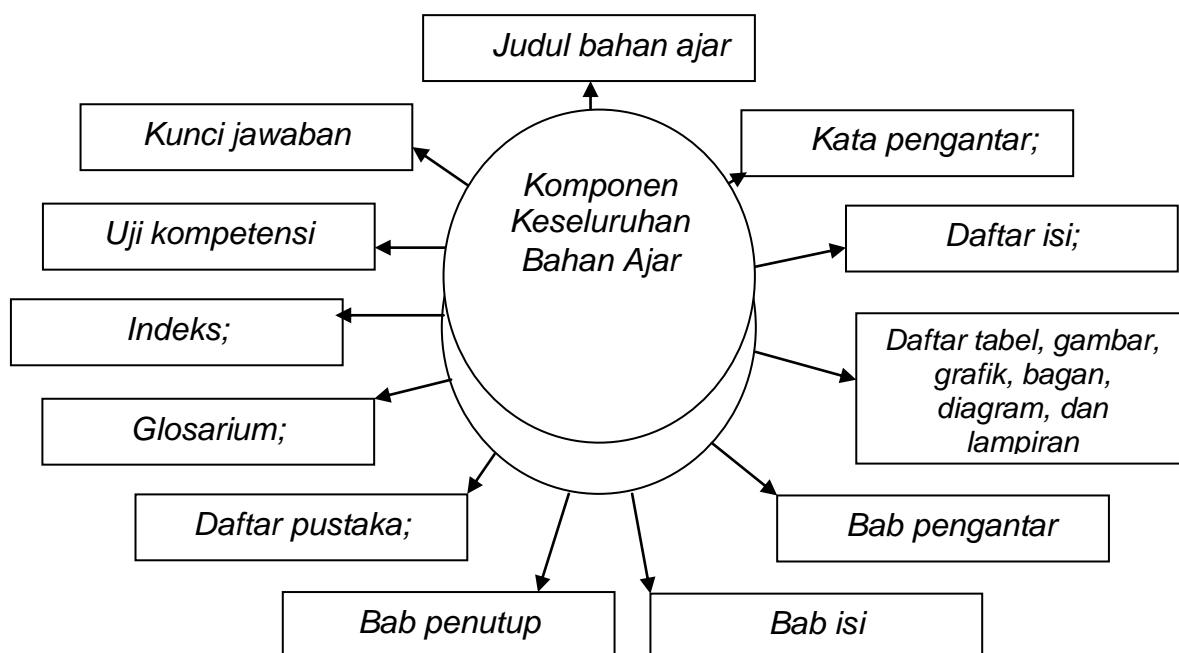
1. Langkah-langkah pemilihan Bahan ajar

Langkah-langkah pemilihan bahan ajar ada empat. Pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Ketiga adalah memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi tadi. Keempat adalah memilih sumber bahan ajar.

2. Cakupan atau ruang lingkup Bahan Ajar

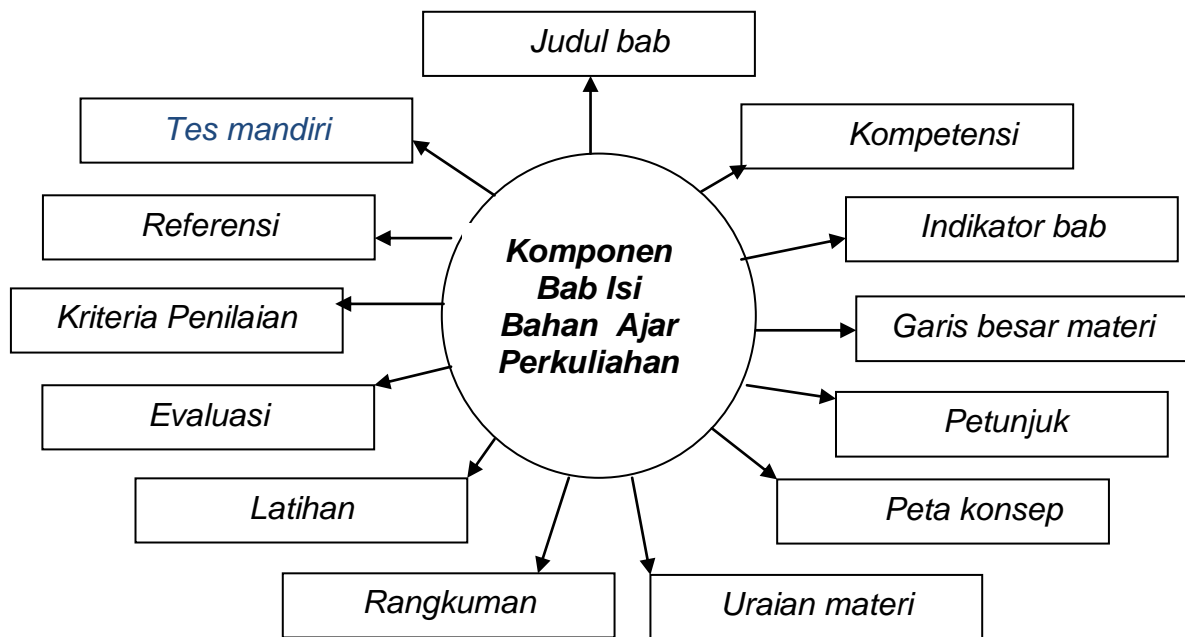
Menurut Suparman (1993), komponen atau bagian yang terdapat dalam bahan ajar adalah tinjauan mata kuliah, bab, daftar pustaka, dan senarai. Tiap-tiap terdapat subkomponen pendahuluan, penyajian, dan penutup. Berdasarkan komponen tersebut, Basuki (2008:3) berpendapat bahwa komponen utama yang perlu ada dalam setiap bahan ajar adalah tinjauan mata kuliah, pendahuluan setiap bab, penyajian dalam setiap bab, penutup setiap bab, daftar pustaka, dan senarai. Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Kosasih (2010:50), yaitu bahwa komponen bahan ajar dapat ditinjau dari dua segi, yaitu komponen keseluruhan isi bahan ajar dan komponen bahan ajar tiap bab. Komponen keseluruhan isi bahan ajar terdiri atas judul, kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan, isi pokok, daftar pustaka, glosarium, dan indeks; sedangkan komponen bahan ajar tiap bab terdiri atas judul bab, tujuan belajar, peta konsep (*apersepsi*), uraian materi,

latihan/tugas, rangkuman, evaluasi, dan referensi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Komponen Keseluruhan Bahan Ajar Perkuliahan

Komponen bahan ajar perkuliahan pada bab isi terdiri atas judul bab, kompetensi bab, indikator bab, garis besar materi/materi pokok, petunjuk (strategi perkuliahan dan strategi mengkaji materi), kriteria penilaian, peta konsep (apersepsi), uraian materi, rangkuman, latihan, evaluasi, dan referensi. Komponen bab isi tersebut dibagangkan berikut ini.



Gambar 2. Komponen Bab Isi Bahan Ajar Perkuliahan

Aspek kriteria kelayakan pemilihan bahan ajar ada lima, yaitu kelayakan isi, penyajian, bahasa, grafika, dan berwawasan karakter bangsa. Kualitas bahan ajar ditentukan berdasarkan empat indikator utama, yaitu format, konsep atau materi, bahasa, dan ilustrasi. Bahan ajar yang dipakai oleh guru atau dosen haruslah memenuhi syarat kelayakan. Pusbuk (2005) dan BSNP (2008) telah mengeluarkan kriteria kelayakan buku pelajaran (bahan ajar). Ada empat aspek kriteria kelayakan yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar, yaitu kelayakan isi, penyajian, kebahasaan, grafika (Pusbuk 2005 dan BSNP 2008). Selain keempat kriteria tersebut, ada satu kriteria lain, yaitu berwawasan karakter bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, D, (1992). *The loss of Virtue: Moral confusion and Disorder in Britain and American*, Teachers colleges: Newyork.
- Anderson, L.W. dan Krathwohl, (2001). *A taxonomy for learning teaching and assesing*, Longman: Newyork.
- Arthur, J. (2005). *Education with Characther: The Moral Economy of schooling*: London.
- Aslan, Mecit, (2011). *Handbook of Moral and Character Education. International Journal of Instruction*, July 2011 Vol 4, No. 2.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Widya Aksara Press.
- _____, (2009). *Inovasi Pembelajaran Project Citizen*, Bandung: Program Studi PKn SPS UPI.
- Borg, Walter R dan Gall, Meredith D. (1987). *Educational Research: An Introduction*. New York: Longman.
- Budiyono, (2009). *Statistika*. UNS Press : Surakarta.
- Center for Indonesian Civic Education. (1999). *Democratic Citizen in a Civil Society: Report of the Conference on Civic Education for Civil Society*, Bandung: CISED
- Creswell, JW. Plano C& Vicky L, (2007). *Designing and conducting mixed methods research* . Thousand Oaks-London: Sage Publications.
- Endah Sulistyowati, (2012). *Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter*. Citra Aji Parama: Yogyakarta.
- Daroeso, Bambang, (1986). *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Dimerman, S, (2009). *Characther Is The Key (How To Unlock The Best in Our Children and Ourselves)*. John Wiley & Sons: Canada.
- Donie Koesuma, (2007). *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik di Zaman Global*. Grasindo: Jakarta.
- _____, (2010). *Pendidikan Karakter*. Grasindo: Jakarta.

- Gall, Meredith D.; Gall, Joyce P.; dan Borg, Walter R. (2011). *Educational Research*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Fatchul Mu'in, (2011). *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik*. Ar-Ruz Media: Yogyakarta.
- Fraenkel, J.R. and Wallen, N.E. (1993). *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw Hill Inc.
- Furqon Hidayatullah, M. (2010). *Dosen Sejati: Membangun Berkarakter Kuat dan Cerdas*, Yuma Pustaka: Surakarta.
- Gerhard Himmelman, (2013). *Competences for Teaching, Learning and Living Democratic Citizenship*. dalam Murray Print dan Dirk Lange (eds.), *Civic Education and Competences for Engaging Citizens in Democracies*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Irwan, (2010). *Landasan Membangun Karakter Bangsa*. Artikel pendidikan, Januari 2010.
- Joyce, B & Weil M, (2009). *Model Of Teaching*. New Jersey, Prentice-Hall, Inc.
- Joyce, Bruce, Marsha Weill, Emily Calhoun, (2009). *Model Of Teaching* (Alih Bahasa: Ahmad Fawaid dan Ateilla Mirza) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kemendiknas, (2010). *Kebijakan Pendidikan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemendiknas.
- Kirschenbaum, H. (1998). *100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings*. Allyn and Bawn: Boston.
- Kohlberg, Lawrence, (1977). *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Larry P.N, Darcia Narvaez, (2014). *Handbook Pendidikan Moral dan Karakter (Handbook of Moral and Character Education)*. Bandung: Nusa Media.
- Lickona, T. (1987). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Simon & Schuster, Inc.
- _____. (2004). *Character Matters: How to Help Our Children Develop*.
- Mayer, RE, (2008). *Learning and Instruction* . New Jersey: Pearson.
- Mohammad Takdir Ilahi, (2014). *Gagalnya Pendidikan Karakter, Analisis dan Solusi Pengendalian Karakter Emas Anak Didik*. AR Ruz Media: Yogyakarta.

- Muchlas Samani, Hariyanto, (2012). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhammad Rohman, (2012). *Kurikulum Berkarakter*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Nawawi, Hadari, (2007). *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ramli, (2003). *Menguak Karakter Bangsa*, Grasindo: Jakarta.
- Rauner, Felix, & Maclean, Rupert, (2008). *Handbook of technical and vocational education and training research*. Bremen-Bonn Germany: Springer.
- Salam, Burhanudin, (2000). *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarbaini, (2011). *Model Pembelajaran Berbasis Kognitif Moral dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Simon, (1972). *Values Clarification (A Handbook of Practical Strategies For Teachers and Students)*. Hart Publish Company: Newyork.
- Sugiyono, (2007), *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung: Alfabeta.
- _____, (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* . Cetakan ke-10, Alfabeta: Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Program Pascasarjana UPI dan PT Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, (2010). *Urgensi Pendidikan Karakter/ artikel pendidikan/ maret 2010*.
- Spord, (2004). *Philosophical Discussion in Moral Education (The Community of Ethical Inquiry)* . Routledge: London.
- Tillman, D, (2001). *Living Values Activities for Children 8 -14* (Editor Respati,dkk). Jakarta: PT Grasindo.
- Winataputra, Udin S.(2008). *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila (Suatu Penelitian Kepustakaan)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Zaim Elmubarok, (2008). *Membumikan Pendidikan Nilai* , Alfabeta : Bandung.